



**LAPORAN**  
**EVALUASI**  
**PELAKSANAAN RKPD DAN**  
**RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**PROVINSI NTB**  
**TRIWULAN I TAHUN 2022**

**BAPPEDA PROVINSI NTB**  
**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

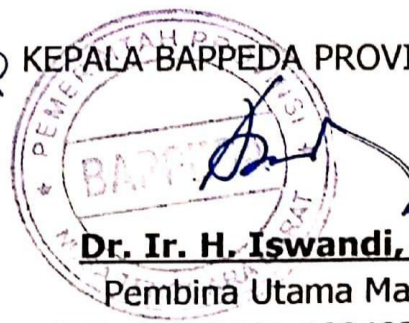
Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB pada Triwulan I tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan evaluasi RKPD merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Provinsi NTB pada Triwulan I tahun 2022 berdasarkan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dan telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Berdasarkan sasaran pembangunan daerah, Terdapat 37 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB Tahun 2022. Sebanyak 3 indikator yang telah dapat dihitung tingkat capaiannya pada Triwulan I 2021 yaitu Nilai Realisasi Investasi, Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Meskipun belum ada indikator yang memenuhi target, namun capaian indikator dari sasaran pembangunan NTB tersebut *on the track*.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan perencanaan selanjutnya dalam pembangunan di NTB. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan Bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, Mei 2022

☞ KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB ☜



**Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19651231 199403 1 153

## **RINGKASAN**

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dimana pemerintah provinsi NTB dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik tahunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja perangkat daerah Provinsi NTB Tahun 2020 maupun lima tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023 harus mengetahui progres dan tingkat capaian secara berkala dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan.

Laporan evaluasi RKPD Triwulan I merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan I tahun 2022 mengacu pada RKPD Tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2022, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan 281 kegiatan dan 861 sub kegiatan. Total program Perangkat Daerah sebanyak 178 dengan 557 kegiatan dan 2021 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.968.740.209.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 472.179.773.960,00 atau 7,91 persen.

Hasil capaian kinerja dan anggaran sampai Triwulan I tahun 2022 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah tersebut, rata-rata capaian kinerja sebesar 2.81 persen dengan capaian keuangan sebesar 4.65 persen. Rendahnya capaian kinerja disebabkan karena pekerjaan pada Triuwlan I masih terfokus pada program kegiatan yang bersifat administratif. Selain itu, rendahnya realisasi fisik dan serapan anggaran pada triwulan I ini, disebabkan karena sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan II – IV tahun anggaran 2022.

Terdapat 37 indikator kinerja pada tahun 2022, diketahui bahwa terdapat 3 indikator yang sudah dapat dihitung tingkat capaiannya dan 34 indikator yang lain masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Diantara 3 indikator yang telah dapat dihitung tingkat capaiannya pada Triwulan I 2021 tersebut adalah Nilai Realisasi Investasi, Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Meskipun

belum ada indikator yang memenuhi target, namun capaian indikator dari sasaran pembangunan NTB tersebut *on the track*.

Capaian terhadap 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi NTB tahun 2022 secara keseluruhan terdapat 2 indikator atau 1,94 persen tercapai sesuai target bahkan melampaui, 4 indikator belum memenuhi target atau 3,88 persen dan masih terdapat 97 indikator belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait. Indikator yang sudah dapat dihitung tersebut yaitu Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam, Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Nilai Realisasi Investasi, Rata-rata Lama Menginap, dan Nilai Tukar Petani.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I : PENDAHULUAN .....	84
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	84
<b>1.2 Landasan Hukum</b> .....	85
<b>1.3 Tujuan</b> .....	85
<b>1.4 Sasaran</b> .....	86
<b>1.5 Sistematika Penulisan Laporan</b> .....	86
BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022.....	87
<b>2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2022</b> .....	87
<b>2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2022</b> .....	88
<b>2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2022</b> .....	89
BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH DAERAH TAHUN 2022 .....	93
BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022 TRIWULAN I.....	112
<b>4.1 Hasil Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan RKPD Triwulan I tahun 2022</b> .....	112
<b>Capaian RPJMD Provinsi NTB 2019-20223 sampai tahun 2022</b> .....	197
4.2.1 Indikator Kinerja Utama.....	197
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah .....	202
BAB V : PENUTUP .....	210
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	210
<b>5.2 Rekomendasi</b> .....	211

# **BAB I : PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPDP merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari NKRI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPDP tersebut. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPDP Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat baik dalam skala nasional maupun regional.

RKPDP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. RKPDP Tahun 2022 merupakan perencanaan tahunan keempat penjabaran RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yang diarahkan pada upaya pemulihan sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19, peningkatan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, menjaga stabilitas makro ekonomi, serta memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Dengan demikian diharapkan seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam mewujudkan dan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPDP maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPDP dilakukan setiap triwulan guna memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPDP provinsi dapat dicapai. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada pasal 261 disebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPDP lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPDP Provinsi untuk mengetahui realisasi antara rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam RKPDP provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPDP provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Laporan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah berdasarkan sasaran pembangunan pada Triwulan I tahun 2022 mengacu pada RKPDP Tahun 2022 sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2021. Apabila berdasarkan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaannya maka BAPPEDA bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan baik pada pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan berikutnya maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan perubahan RKPD provinsi NTB Tahun 2022 dan RKPD Provinsi NTB tahun berikutnya.

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022;

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 ini adalah untuk mengetahui:

1. Daya serap dan capaian target kinerja sasaran pembangunan dan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2022;
2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;

3. Kinerja sebelumnya yang dapat dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat program maupun kegiatan.

#### **1.4 Sasaran**

Sasaran dari kegiatan evaluasi RKPD Tahun 2020 ini adalah untuk mengukur capaian Sasaran Pembangunan dan program/kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas sampai dengan Triwulan I tahun 2022 sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2022.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Laporan**

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2022 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, dan sistematika penulisan laporan;
- Bab II : Prioritas, Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2022. Bab ini berisi tentang prioritas sasaran dan target pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022;
- Bab III : Rencana Program Prioritas Tahun 2022. Bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2022.
- Bab IV : Capaian Target Kinerja Pembangunan Triwulan I tahun 2022. Bab ini berisi Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas serta Penyerapan Anggaran Tahun 2022 sampai Triwulan I.
- Bab V : Penutup



## **BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022**

### **2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPDP Tahun 2022**

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPDP Tahun 2022 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023.

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023 adalah "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang", Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 -2023 sebagai berikut:

**Misi 1 "NTB TANGGUH DAN MANTAP"** melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;

**Misi 2 "NTB BERSIH DAN MELAYANI"** melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;

**Misi 3 "NTB SEHAT DAN CERDAS"** melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;

**Misi 4 "NTB ASRI DAN LESTARI"** melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;

**Misi 5 "NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI"** melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;

**Misi 6 "NTB ADIL DAN BERKAH"** melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Adapun tujuan pembangunan NTB Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana.
2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel.
4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing.
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing.
6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan.
7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas.
8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan.
9. Terwujudnya perindustrian yang unggul.
10. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (Bahagia).

Berdasarkan tujuan pembangunan, maka sasaran pembangunan NTB Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.
5. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Meningkatnya Profesionalisme ASN.
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
10. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan.
11. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
12. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
13. Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
14. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas.
15. Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin .
16. Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan.
17. Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin.
18. Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok.
19. Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup.
20. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.
21. Meningkatnya Daya Saing Industri.
22. Menurunnya Pengangguran Terbuka.
23. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat.
24. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah.
25. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.
26. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## **2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2022**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2022 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode ketiga dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sendiri memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Pembangunan NTB yaitu "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang".

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari periode RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi:

1. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat dalam masa pandemi Covid-19, dengan strategi:

- a. Penguatan sektor Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19
  - b. Jaringan Pengaman Sosial bagi masyarakat miskin
  - c. Penanganan dampak ekonomi Pandemi COVID-19.
2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, dengan strategi :
- a. Mengoptimalkan pertanian/agribisnis dan investasi, serta penyerapan tenaga kerja melalui kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta;
  - b. Pemulihan dan pengembangan sektor/aktivitas pariwisata;
  - c. Mengembangkan industri olahan dan alat-mesin berbasis pertanian, kehutanan, pertambangan dengan pola kemitraan;
  - d. Meningkatkan konektivitas wilayah dan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air dan energi, terutama pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
3. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi, dengan strategi:
- a. Mendorong Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah.
  - b. Mendorong Pemerataan Pendapatan Antar Kelompok Masyarakat.
  - c. Memperluas Akses terhadap kesempatan kerja dan peluang berusaha; serta
  - d. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

### **2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2022**

Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2021 yaitu **"Reformasi Ekonomi dengan Dukungan SDM yang Unggul"**. Adapun Prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD 2022 yaitu :

1. Memperkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana, mendukung Prioritas Nasional 6;
2. Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi, mendukung Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5;
3. Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik mendukung Prioritas Nasional 7
4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan SDM, mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Nasional 3;
5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan SDM, mendukung Prioritas Nasional 3;
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan, mendukung Prioritas Nasional 6;
7. Memperkuat Integrasi Hulu-Hilir Sistem Agribisnis Dalam Mendukung Investasi, mendukung Prioritas Nasional 1;
8. Mengoptimalkan Pengelolaan Pariwisata Pasca Pandemi Covid-19, mendukung Prioritas Nasional 1;

9. Industrialisasi Produk Unggulan, mendukung Prioritas Nasional 1;
10. Penguatan Stabilitas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, mendukung Prioritas Nasional 4.

Target Pembangunan berdasarkan sasaran pembangunan tahun 2022 disajikan dalam matrik sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2022**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2022
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (Point)			Point	119.41
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.63
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas			Point	79.84
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	85.36
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	52.17
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	86.86				
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	BB
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	36.97
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (76,01 - 80,00)
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.70
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.53
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			Point	72.43
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67.08
					Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	30.99
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM	Indeks Pendidikan			Point	62.74
Meningkatnya kualitas dan	Harapan Lama Sekolah			Tahun	13.73		

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2022
		yang berdaya saing		jangkauan layanan pendidikan	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7.04
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	68.22
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	42.93
					Indeks Kualitas Udara	Point	87.56
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	70.89
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	68.70	
			Neraca pengelolaan sampah		%	85.00	
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	60.00
	Persentase Pengurangan Sampah	%	25.00				
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	74.68
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	15,428
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.71
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.70
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	78.45
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.91
					Rasio Elektrifikasi	%	99.88
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	65.80
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11,604
				Terwujudnya pariwisata	Pertumbuhan sektor	%	3.00

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2022
		yang dapat diandalkan	kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	129.78
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	7.50
				Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	173.02
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.19
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	14.05
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	20.00
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.72
			Partisipasi politik masyarakat			%	84.57
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.90
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	61.16
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	19.27
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80

## **BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH DAERAH TAHUN 2022**

Program pembangunan daerah didasarkan pada program yang mendukung sasaran pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagaimana telah dituangkan dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2022. Adapun program pembangunan daerah pada tahun 2022 sebanyak 120 program dari 147 Program perangkat daerah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penanganan Bencana
3. Program Penyelenggaraan Jalan
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)
6. Program Pengelolaan Pelayaran
7. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Program Penyelenggaran Pengawasan
10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
11. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
13. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
14. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Program Penataan Organisasi
16. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
17. Program Kepegawaian Daerah
18. Pengembangan Sumber Daya Manusia
19. Program Pendaftaran Penduduk
20. Program Pencatatan Sipil
21. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
22. Program Peningkatan Kerjasama Desa
23. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
24. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
25. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
26. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
27. Program Perencanaan Tenaga Kerja
28. Program Pembinaan Perpustakaan

29. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
30. Program Pelayanan Penghubung
31. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
32. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
33. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
34. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
35. Program Pengelolaan Pendidikan
36. Program Pengembangan Kurikulum
37. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
38. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
39. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
40. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
41. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
42. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
43. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
44. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
45. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
46. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
47. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
48. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
49. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
50. Program Pengelolaan Hutan
51. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
52. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
53. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)
54. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
55. Program Pengelolaan Persampahan
56. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
57. Program Promosi Penanaman Modal
58. Program Pelayanan Penanaman Modal
59. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
60. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
61. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
62. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
63. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner



64. Program Penyuluhan Pertanian
65. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
66. Program Pengelolaan Hutan
67. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
68. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
69. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
70. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
71. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
72. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
73. Program Rehabilitasi Sosial
74. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
75. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
76. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
77. Program Penanganan Kerawanan Pangan
78. Program Pengawasan Keamanan Pangan
79. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
80. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
81. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
82. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
83. Program Pengembangan Perumahan
84. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
85. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
86. Program Pengembangan Ekspor
87. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
88. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
89. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
90. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
91. Program Pemasaran Pariwisata
92. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
93. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
94. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
95. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
96. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
97. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
98. Program Pengembangan Umkm
99. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
100. Program Penempatan Tenaga Kerja
101. Program Hubungan Industrial

102. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
103. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
104. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
105. Program Kesejahteraan Rakyat
106. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
107. Program Pengembangan Kebudayaan
108. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
109. Program Pembinaan Sejarah
110. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
111. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
112. Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum
113. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
114. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
115. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
116. Program Perlindungan Perempuan
117. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
118. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
119. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
120. Program Perlindungan Khusus Anak

Pemetaan program Pembangunan Daerah kedalam sasaran pembangunan pada tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Pemetaan Program Pembangunan Daerah Kedalam Sasaran  
Pembangunan Pada Tahun 2022**

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
<b>Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah</b>					
<b>Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana</b>	<b>Indeks Risiko Bencana</b>	<b>Point</b>	<b>119.41</b>		
<b>Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana</b>	<b>Indeks Kapasitas Daerah</b>	<b>Point</b>	<b>0.63</b>		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%	32.78	4,749,579,691	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
	Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	67.34		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	2,524,923,366	Dinas Sosial
<b>Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan</b>	<b>Indeks Aksesibilitas</b>	<b>Point</b>	<b>79.84</b>		
<b>Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar</b>	<b>Persentase Kemantapan jalan</b>	<b>%</b>	<b>85.36</b>		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	85.36	424,968,754,650	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar</b>	<b>Persentase Kemantapan Sistem Irigasi</b>	<b>%</b>	<b>52.17</b>		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	75.37	78,749,039,047	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah</b>	<b>Persentase konektivitas transportasi publik</b>	<b>%</b>	<b>86.86</b>		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	80.40	4,694,778,700	Dinas Perhubungan
	Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	98.59		
	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	35		
	Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	49.39		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	61.61	764,484,200	Dinas Perhubungan
<b>Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi</b>					

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
<b>Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Point</b>	<b>BB</b>		
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</b>	<b>Opini BPK</b>	<b>Status</b>	<b>WTP</b>		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	739,588,857,260	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100	1,092,593,901	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%	70	1,849,401,028	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	85	1,281,660,820	INSPEKTORAT
	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	44.44	2,517,297,403	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	6.55	472,000,744	INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	96	1,865,531,280	
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD</b>	<b>%</b>	<b>36.97</b>		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	36.76	554,780,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%	52.03	15,363,280,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
<b>Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>Kategori</b>	<b>BB (76,01 - 80,00)</b>		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	4,779,893,285	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	12,519,651,738	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase PD yang Meningkat Nilai Implementasi SAKIP-nya	%	91.11	981,904,708	INSPEKTORAT

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	22,22	851,362,983	INSPEKTORAT
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%		1,282,219,090	Biro Organisasi
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	3,165,190,197	Biro Pemerintahan
<b>Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN</b>	<b>Indeks Profesionalisme ASN</b>	<b>Point</b>	<b>0.70</b>		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai	16	7,150,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
	Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan		80		
	Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi		88		
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan		132		
	Nilai Aspek Sistem Informasi		16		
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0.09	16,960,960,998	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0.04		
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0.14		
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0.59		
<b>Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat</b>	<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	<b>Point</b>	<b>4.53</b>		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per- satu penduduk	%	98,80	290,696,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	216,094,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%	100	1,042,092,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkar hutan dan pesisir	%	20	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%	70	5,599,748,172	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	55	2,058,351,845	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	25	505,798,581	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	40	493,138,545	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	85	100,214,713	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	1,135,237,618	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	208,116,607	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	Orang	41,000		Badan Penghubung Daerah
<b>Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah</b>					
<b>Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan kehatan untuk SDM yang berdaya saing</b>	<b>Indeks Kesehatan</b>	<b>Point</b>	<b>72.43</b>		
<b>Sasaran 1: Meningkatnya derajat kehatan dan gizi masyarakat</b>	<b>Angka Harapan Hidup</b>	<b>Tahun</b>	<b>67.08</b>		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kehatan yang terakreditasi	%	85	163,526,294,113	Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kehatan	%	97		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	%	75		
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100		
	Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	%	90		
	Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	97		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	%	100		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	2.5	1,391,035,404	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%	90	100,000,000	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	85	54,518,919,382	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	75	10,339,417,902	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	78.00	48,764,835,901	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
<b>Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat</b>	<b>Persentase Balita Stunting</b>	<b>%</b>	<b>30.99</b>		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita Wasting	%	11.41		Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%	70	1,844,102,816	Dinas Kesehatan
<b>Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing</b>	<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>Point</b>	<b>62.74</b>		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.73		
	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7.04		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	99.95	496,806,046,231	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	94.38		
	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	97.57		
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70		
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1		
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	1:18		
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	1:12		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum	%	100	696,067,714	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	69,288,275,305	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	99.58		
	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	100		
	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	60		
	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		6		
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	100	65,788,824	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	35	309,938,698	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	3,711,881,596	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Altlet Berprestasi	%	100	10,438,816,493	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan</b>					



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
<b>Tujuan 1:</b> Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>Point</b>	<b>68.22</b>		
<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	<b>Indeks Kualitas Air</b>	<b>Point</b>	<b>42.93</b>		
	<b>Indeks Kualitas Udara</b>	<b>Point</b>	<b>87.56</b>		
	<b>Indeks Kualitas Air Laut</b>	<b>Point</b>	<b>70.89</b>		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	24.24	337,210,648	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	10	932,857,745	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi	1	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit	210	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/ kegiatan	25	199,138,369	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%	10	208,086,986	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok	0	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	20	211,009,847	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	<b>Indeks Kualitas Tutupan Lahan</b>	<b>Point</b>	<b>68.70</b>		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	83	20,303,985,721	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	10.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30,503	935,494,875	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	17.70	699,241,612	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	4.00	4,703,740,157	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	89.69	892,236,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan</b>	<b>Neraca pengelolaan sampah (%)</b>	<b>%</b>	<b>85.00</b>		
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase Penanganan Sampah</b>	<b>%</b>	<b>60.00</b>		
	<b>Persentase Pengurangan Sampah</b>	<b>%</b>	<b>25.00</b>		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%	85	5,299,032,825	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi</b>					
<b>Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas</b>	<b>Indeks Daya Beli (Point)</b>	<b>%</b>	<b>74.68</b>		
<b>Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan</b>	<b>Nilai Realisasi Investasi</b>	<b>Rp. Milyar</b>	<b>15,428</b>		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perentase Peningkatan Minat Investasi	Persen	5	596,026,769	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen	100.00	863,871,915	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	90	641,960,427	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen	55	888,212,883	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen	100	140,706,575	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas</b>	<b>Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan &amp; kehutanan</b>	<b>%</b>	<b>23.71</b>		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%	9.5	44,798,298,458	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	%	100	564,947,181	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS	%	< 1	2,799,889,261	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%	100	423,050,759	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Sarana Pertanian	%	1.99	19,956,291,589	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	%	65.56	79,975,449,202	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/ paket	2		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	96	434,192,818	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	70	6,731,344,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	10		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	8.74	4,909,615,839	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	249,099	8,708,211,521	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1,219,005	3,795,727,604	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%	99.92	1,962,524,606	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	214373	1,352,738,477	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>Sasaran 3: Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin</b>	<b>Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	788,655,091	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	3.5	17,873,444,354	Dinas Sosial

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	12,479,741,066	Dinas Sosial
<b>Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan</b>	<b>Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi</b>	<b>Skor</b>	<b>86.70</b>		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	%	79.62	300,963,367	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100	3,778,523,930	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	5.77	358,435,000	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	85.00	679,047,614	Dinas Ketahanan Pangan
<b>Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>	<b>Cakupan Air Minum</b>	<b>%</b>	<b>78.45</b>		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	78.45	3,337,898,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>	<b>Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak</b>	<b>%</b>	<b>80.91</b>		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	97.00		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	84,488	163,032,669,005	Dinas Perumahan dan Permukiman
<b>Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>	<b>Rasio Elektrifikasi</b>	<b>%</b>	<b>99.88</b>		
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%	5.64	643,295,009	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	99.88	1,791,333,986	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>	<b>Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)</b>	<b>%</b>	<b>65.80</b>		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	2,526,185,090	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Rumah tangga menempati hunian layak	%	98.86		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
<b>Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok</b>	<b>Inflasi</b>	<b>%</b>	<b>3,0 - 4,0</b>		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawas an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%	70	289,831,387	Dinas Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	1,716,733,208	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	5	1,349,224,006	Dinas Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%	85	1,297,512,601	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	12,446,324,087	Dinas Perdagangan
<b>Sasaran 7: Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup</b>	<b>Pengeluaran per kapita (Rp.000)</b>	<b>Rp.000</b>	<b>11,604</b>		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	490,000,000	Dinas Perdagangan
<b>Tujuan 2: Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan</b>	<b>Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)</b>	<b>%</b>	<b>3.00</b>		
<b>Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata</b>	<b>Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)</b>	<b>Rp. Milyar</b>	<b>129.78</b>		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	%	85.85	5,503,206,408	Dinas Pariwisata
	Persentase Geosite yang tertata	%	50		
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang		2,446,751,761	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%		209,889,754	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%		1,160,576,170	Dinas Pariwisata

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
<b>Tujuan 3:</b> Terwujudnya perindustrian yang unggul	<b>Pertumbuhan Industri (%)</b>	<b>%</b>	<b>7.50</b>		
<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya daya saing industri	<b>Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)</b>	<b>Rp. Milyar</b>	<b>173.02</b>		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	35,280,281,729	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah	%	3.14	1,040,710,958	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	704,426,525	Dinas Perindustrian
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%	6.35	1,597,038,675	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%	53.53	2,647,148,104	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	3,711,881,596	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		
<b>Sasaran 2:</b> Menurunnya pengangguran terbuka	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>%</b>	<b>3.19</b>		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	17	1,232,588,784	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	51.09	1,115,004,981	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	22	337,215,751	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	22	1,139,740,311	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan</b>					
<b>Tujuan 1:</b> Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	<b>Indeks Kriminalitas</b>	<b>Point</b>	<b>14.05</b>		
<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	<b>Persentase penurunan konflik sosial</b>	<b>%</b>	<b>20.00</b>		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	506,635,309	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	10.53	3,685,524,366	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	97,655,935,112	Biro Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Adat Aktif	%	65	8,086,485,113	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Bumdes Berprestasi	%	27		
	Persentase Pokja Posyandu aktif	%	80		
	Persentase Posyantek yang aktif	%	56.41		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	72.73	2,173,198,075	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	508,873,145	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	%	100	272,477,237	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas &amp; Penegakan Produk Hukum Daerah</b>	<b>Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah</b>	<b>%</b>	<b>5.72</b>		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100.00	3,932,903,666	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100.00		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	68.96	808,702,907	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%	100	1,911,317,467	Biro Hukum
	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi	%	100		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%	100		
	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%	100		
	Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%	100		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%	100		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%	100		
<b>Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani</b>	<b>Partisipasi Politik Masyarakat (%)</b>	<b>%</b>	<b>84.57</b>		
<b>Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik masyarakat</b>	<b>Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik</b>	<b>%</b>	<b>0.90</b>		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	90	5,153,432,345	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	%	81.35	541,317,956	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
<b>Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani</b>	<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>	<b>Point</b>	<b>61.16</b>		
<b>Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan</b>	<b>Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan</b>	<b>%</b>	<b>19.27</b>		
	<b>Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak</b>	<b>%</b>	<b>80</b>		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	52.17	2,021,592,521	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	75.52	920,503,730	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	%	5	434,995,741	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender		1	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80.00	512,037,084	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	%			
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		727,588,084	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif	%			

## **BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022 TRIWULAN I**

### **4.1 Hasil Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan RKPD Triwulan I tahun 2022**

Laporan evaluasi RKPD Triwulan I merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan I tahun 2022. Evaluasi ini mengacu pada RKPD Tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2022, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.968.740.209.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 472.179.773.960,00 atau 7,91 persen.

Hasil capaian kinerja dan anggaran sampai Triwulan I tahun 2022 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah tersebut, rata-rata capaian kinerja sebesar 2,81 persen dengan capaian keuangan sebesar 4,65 persen. Rendahnya capaian kinerja disebabkan karena pekerjaan pada Triwulan I masih terfokus pada program kegiatan yang bersifat administratif. Selain itu, rendahnya realisasi fisik dan serapan anggaran pada triwulan I ini, disebabkan karena sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan II – IV tahun anggaran 2022.

Adapun rekapitulasi hasil capaian kinerja dan keuangan menurut pemetaan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. **Sasaran Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana** dengan indikator kinerja Indeks Kapasitas Daerah dengan target kinerja 0,63. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022. Sasaran ini dilaksanakan melalui :
  - a. Program Penanggulangan Bencana pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB dan Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna dengan target kinerja 32,78% dan 67,34%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan

- untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; Penanganan Pascabencana Provinsi, Penyusunan Rencana Kontijensi.
- b. Program Penanganan Bencana pada Dinas Sosial dengan indikator kinerja Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi dengan target kinerja sebesar 100%. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Pelayanan Dukungan Psikososial.
2. **Sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar** dengan indikator kinerja Persentase Kemantapan jalan dengan target 85,36%. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022. Untuk meningkatkan kemantapan jalan dilakukan dengan: Program Penyelenggaraan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator kinerja yaitu Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap dengan target kinerja sebesar 85,36%%. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jembatan, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan.
3. **Sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar** dengan indikator kinerja Persentase Kemantapan Sistem Irigasi dengan target 52,17%. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022. Untuk meningkatkan kemantapan system irigasi, dilakukan dengan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator kinerja yaitu Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi dengan target kinerja sebesar 75,37%. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya; Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi; Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku; Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing; Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya; Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi, dan Operasional Unit Pengelola Irigasi); dan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Ha - Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa; Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah; Peningkatan Jaringan Irigasi

Permukaan;Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya;Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai;Rehabilitasi Bendung Irigasi;Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi;Operasional Unit Pengelola Irigasi).

4. **Sasaran Meningkatkan konektivitas antar wilayah** dengan indikator kinerja Persentase konektivitas transportasi publik dengan target kinerja sebesar 86,86%. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik (target kinerja 80,40%), Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (target kinerja 98,59%), Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik (target kinerja 35%), Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik (target kinerja 49,39%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan) Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B; Pembangunan Gedung Terminal; Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)), Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi (Sub Kegiatan : Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi dan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas kebijakan jalan provinsi), Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan (Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal), Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi; Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Provinsi), Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi; Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas

- Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi), Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi).
- b. Program Pengelolaan Pelayanan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengan indikator kinerja yaitu Sarana dan prasarana transportasi Laut dalam kondisi baik (target kinerja 61,61%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas), Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan "Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/

Kota"), Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional (sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional), Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (sub kegiatan : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional).

5. **Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah** dengan indikator kinerja Opini BPK dengan target status WTP. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022. Untuk mempertahankan status WTP, dilakukan dengan Kegiatan:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi (target kinerja 100 %); dan Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota (target kinerja 100 %). Bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari 6 kegiatan meliputi : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Pengolahan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel. Target kinerja program ini sebesar 70%. Kegiatan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Target Kinerja 31 Jenis Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun.
- c. Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Inspektorat Provinsi NTB dengan indikator kinerja yaitu Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD dengan target 85% dan Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah dengan target 44,44%. Program ini didukung dengan 2 kegiatan yaitu kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.
- d. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan 2 indikator kinerja yaitu persentase peningkatan nilai unsur pembentuk SPIP dengan target 6,55% dan indikator Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat tepat waktu dengan target 96%. Program ini didukung dengan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

6. **Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah** dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022. Sasaran ini dilaksanakan melalui :
- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Derajat Desentralisasi Fiskal. Target kinerja indikator ini adalah 36,76%. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan Indikator kinerja Pertumbuhan pendapatan daerah. Adapun sub kegiatan yang dilakukan yaitu Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan yang sudah terusun 2 dokumen.
  - b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK). Target kinerja indikator ini adalah 52,03%. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Indikator kinerja Pertumbuhan pendapatan asli daerah. Adapun sub kegiatan yang dilakukan yaitu Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; Penetapan Wajib Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; Penagihan Pajak Daerah; Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.
7. **Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dengan indikator kinerja Nilai SAKIP dengan target kinerja BB. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022. Sasaran ini dilaksanakan melalui :
- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator kinerja Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan. Target kinerja untuk program ini sebesar 100%. Bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari 3 kegiatan meliputi : Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (sub kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah ; Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya; Pelaksanaan Konsultasi Publik; Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD; Pelaksanaan Musrenbang Provinsi; dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi); Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (sub kegiatan:

- Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD; dan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota); Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (sub kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi; Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah; Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota).
- b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD. Target kinerja untuk program ini adalah 100%. Bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari 3 kegiatan meliputi: Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia); dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia; Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA); Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan



- Kewilayahan (sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan).
- c. Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Inspektorat terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan. Indikator kinerja untuk program ini adalah Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya. Target untuk program ini 91,11%. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. Indikator kinerja untuk kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal adalah Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal. Sedangkan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, indikator kinerjanya yaitu jumlah dokumen laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu. Sub kegiatan untuk kegiatan ini yaitu Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah; Reviu Laporan Kinerja; Kerjasama Pengawasan Internal; dan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu untuk kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
- d. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi pada Inspektorat dengan indikator kinerja Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM dengan target kinerja sebesar 22,22%. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan indikator kinerja jumlah dokumen laporan hasil pendampingan dan asistensi. Sub kegiatan untuk kegiatan ini adalah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi; dan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
- e. Program Penataan Organisasi pada Biro Organisasi dengan indikator kinerja Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkatkan. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program ini sebanyak 2 kegiatan dengan 2 sub

kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang telah menindaklanjuti hasil penyederhanaan struktur Organisasi dan Persentase PD yang telah menindaklanjuti hasil evaluasi Analisis Jabatan dan Beban Kerja. Realisasi kegiatan ini adalah 100% dengan didukung oleh sub kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi, Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota, dan Penataan Analisis Jabatan. Kegiatan kedua yaitu Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang dibina Pelaksanaan PMPRB dan Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan di fasilitasi pelaksanaan PMPRB. Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja; Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan; dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik.

- f. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan indikator kinerja Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah dengan target kinerja sebesar 100%. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari 3 kegiatan dengan 9 sub kegiatan meliputi : Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dengan sub kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan, Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum, dan Fasilitasi Penataan Wilayah. Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas pemerintahan dengan sebesar 1 dokumen. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan sub kegiatan : Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan, dan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan. Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan pelaksanaan otonomi daerah dengan realisasi 1 dokumen. Kegiatan terakhir yaitu Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan sub kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah, Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta, dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama. Indikator kinerja untuk kegiatan ini yaitu jumlah dokumen laporan fasilitasi kerjasama daerah dengan realisasi sebesar 1 dokumen.

8. **Sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN** dengan Indikator Kinerja Indeks Profesionalisme ASN dengan target kinerja 0,70 poin. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022. Dengan demikian capaian program ini sudah memenuhi target. Sasaran ini dilaksanakan melalui :
  - a. Program Kepegawaian Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja yaitu Nilai Aspek Sistem Informasi ; Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan; Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi; Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan

- Pelayanan; dan Nilai Aspek Sistem Informasi. Target kinerja masing-masing indikator secara berturut – turut adalah Nilai sebesar 16, 80, 88, 132 dan 16. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini terdiri dari 4 kegiatan, meliputi: Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (sub kegiatan : Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN; Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN; Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK; Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN; Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN; Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian; Evaluasi Pemberhentian ASN; Fasilitasi Lembaga Profesi ASN; Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN; Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian; Pengelolaan Data Kepegawaian; dan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian); Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN (Sub Kegiatan : Pengelolaan Mutasi ASN; Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN; dan Pengelolaan Promosi ASN); Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN (sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN; Pengelolaan Assessment Center; Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN; Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN; Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat; Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN; Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN; Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional; Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN; Pembinaan Jabatan Fungsional ASN; Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional; dan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional), Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai; Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai; Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur; Pembinaan Disiplin ASN; Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN; Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai; dan Evaluasi Disiplin ASN).
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator kinerja Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial (target kinerja: 0,09%); Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional (target kinerja 0,04); Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis (target kinerja 0,14%); dan Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi (target kinerja 0,59%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari 2 kegiatan dan 12 sub kegiatan meliputi : Kegiatan Pengembangan Kompetensi Tekhnis (sub kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,

Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; dan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum) dan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (sub kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional; Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi; Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga; Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional; Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan; dan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan).

**9. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat** dengan Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik dengan target 4,53 poin. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pendaftaran Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk dengan target 98,8%. Bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dengan sub kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional, dan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi. Indikator kinerja untuk kegiatan ini yaitu Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan pendaftaran kependudukan dengan baik. Target pelaksanaan kegiatan ini adalah 10 kabupaten/kota. Kegiatan selanjutnya yaitu Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dengan Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk, dan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non

- Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk. Indikator kinerja untuk kegiatan ini yaitu Jumlah kegiatan pendukung penyelenggaraan pendaftaran kependudukan.
- b. Program Pencatatan Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil. Target untuk program ini sebesar 100%. Kegiatan untuk mendukung program ini Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan sub kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil.
  - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota dengan target 100%. Kegiatan yang dilakukan sebanyak 2 kegiatan dengan 6 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi dengan indikator kinerja yaitu Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi. Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 3 kali kegiatan yaitu Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi. Kegiatan selanjutnya yaitu Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi dengan indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan. Kegiatan ini diselenggarakan melalui Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.
  - d. Program Peningkatan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan lingkaran hutan dan pesisir. Target untuk Program ini sebesar 20%. Kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja jumlah kerjasama antar desa yang difasilitasi dengan realisasi sebanyak 1 kali. Kegiatan ini didukung melalui Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
  - e. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik dengan target 70%. Capaian kinerja 100%, yang artinya seluruh perangkat daerah lingkup provinsi NTB sudah memanfaatkan media informasi yang dikelola oleh Dinas Kominfotik. Kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator kinerja persentase Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik yang tersedia. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik; Pengelolaan Media Komunikasi Publik; Pelayanan

- Informasi Publik; Layanan Hubungan Manusia; Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik; Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah; Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas; dan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.
- f. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Persentase Layanan Berbasis TIK dengan target 50%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan meliputi Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi; Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah; dan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
  - g. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi dengan target 25%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dengan sub kegiatan meliputi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Dieminasi Data Statistik Sektoral; Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi; Membangun Metadata Statistik Sektoral; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral; dan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah).
  - h. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah dengan target 40%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi; Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi; Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik; dan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi); dan Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi).
  - i. Program Perencanaan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator kinerja Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja dengan target 85%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.
  - j. Program Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan target kinerja 100%. Adapun bentuk kegiatan yang

dilakukan yaitu Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik; Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi; Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan; Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka; dan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi.

- k. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR Dan Naskah Kuno Milik Daerah dengan target capaian 100%. Bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari 3 kegiatan dengan 6 sub kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi dengan indikator kinerja jumlah pengelolaan karya cetak karya rekam. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Kegiatan kedua yaitu Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah; dan Penerbitan Bibliografi Daerah. Kegiatan ketiga yaitu Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi dengan sub kegiatan : Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno; dan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan.
- l. Program pelayanan Penghubung pada Badan Penghubung Daerah dengan indikator kinerja angka kunjungan wisatawan pada anjungan NTB TMII dengan target sebesar 41.000 orang. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu melalui kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi (sub kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam); Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah (sub kegiatan : Penerbitan Katalog Induk Daerah; dan Penerbitan Bibliografi Daerah); Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno; dan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan).

10. **Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat** dengan Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup dengan target sebesar 66,78 tahun. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022. Sasaran ini dilaksanakan melalui:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi (target capaian: 85% ), Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan

kesehatan (target capaian: 97%); Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar (target capaian: 75%); Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB (target capaian: 100%); Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80% (target capaian: 90%); Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar (target capaian: 97%); dan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya); Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya; dan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya); Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga; Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus; Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat; Pengelolaan Surveilans Kesehatan; Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota; Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan; Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas; Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota; Operasional Pelayanan Rumah Sakit; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik; Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional; Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan); Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi; Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan; dan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet); Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit); Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub



- kegiatan : Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) dan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan) ; Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan).
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target sebesar 2,5%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi. Kegiatan ini dilakukan di 10 kabupaten/kota di NTB dengan didukung oleh sub kegiatan pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kegiatan selanjutnya yaitu Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi. Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
  - c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat dengan target capaian sebesar 90%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) (sub kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK); dan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (sub kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional). Lokasi pelaksanaan kegiatan ini tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB.
  - d. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB dengan indikator Kinerja Persentase SPM yang mencapai target dengan capaian 85%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.
  - e. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dengan indikator Kinerja Persentase SPM yang mencapai target dengan capaian 75%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Sub kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit; dan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya). Kegiatan kedua

yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Sub kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus; dan Operasional Pelayanan Rumah Sakit. Kegiatan ketiga yaitu Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan).

- f. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir dengan indikator Kinerja Persentase SPM yang mencapai target (target capaian: 78%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan); dan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit).

11. **Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat** dengan Indikator Kinerja Persentase Balita Stunting dengan target kinerja sebesar 30,99%. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase balita Wasting dengan target capaian sebesar 11,41%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak; dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas dengan target capaian sebesar 70%. Program ini didukung melalui 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah kab/kota yang memiliki kebijakan germas. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi. Kegiatan kedua yaitu Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah Saluran Media yang digunakan dalam penyebaran informasi Kesehatan.

12. **Sasaran Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan** dengan Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah (Target sebesar 13,73 Tahun) ; dan Rata rata Lama Sekolah (Target sebesar 7,04 Tahun). Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (Target kinerja : 99,95%); Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (Target kinerja : 94,38%); Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah (Target kinerja : 97,57%); Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB (Target kinerja : 70%); Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah (Target kinerja : 1%); Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah (Target kinerja : 1:18); dan Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB (Target kinerja : 1:12). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (sub kegiatan : Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru); Penambahan Ruang Kelas Baru; Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah; Rehabilitasi Asrama Sekolah; Pengadaan Mebel Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas; Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas); Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (sub kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Sekolah; Pembangunan Ruang Praktik Siswa; Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah; Pengadaan Mebel Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan; Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan); Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus (sub kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik; Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus; Pembinaan Minat, Bakat dan

- Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus;Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus;Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus).
- b. Program Pengembangan Kurikulum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kurikulum (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dengan Sub kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah; dan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah.
  - c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV dengan target 100%; Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV (Target kinerja : 99.58%); Persentase Kepala Sekolah bersertifikat (Target kinerja : 100%); Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat (Target kinerja : 60%); Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) (Target kinerja : 6%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Provinsi dengan sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
  - d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (sub kegiatan : Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; dan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat); Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (sub kegiatan : Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; dan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat).
  - e. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan. Target program ini sebesar 35% . Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi.
  - f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan indikator kinerja Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi (Target

kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi; Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera; Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi; Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi; dan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.

- g. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan indikator kinerja Presentase Pembinaan Atlet Berprestasi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi); Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (sub kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi; dan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event); Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (sub kegiatan : Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)); dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan (sub kegiatan : Pengembangan Organisasi Keolahragaan).

13. **Sasaran Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup** dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air Laut. Target masing-masing indikator tersebut adalah sebesar 42,93 poin; 87,56 poin; dan 70,89 poin. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Dengan kata lain seluruh indikator tersebut sudah memenuhi target yang diharapkan. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun dengan Target kinerja sebesar 24,24%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi; dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi); Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi (sub kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang; Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD; dan Pembuatan dan

- Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup).
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya dengan Target kinerja sebesar 10 lokasi. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut; dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi); Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Pembuatan (sub kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat).
  - c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase taman kehati yang terkelola dengan target kinerja 1 lokasi. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
  - d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya. Target untuk program ini sebesar 210 unit. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengumpulan Limbah B Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.
  - e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja jumlah pelaku usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan dengan target kinerja sebesar 25 usaha/kegiatan. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
  - f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan. Target program ini sebesar 10%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan

- Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.
- g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja jumlah penanganan pengaduan lingkungan hidup dengan target sebesar 20 pengaduan. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.

**14. Sasaran Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan**

**Hidup** dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan target 68,7 poin. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui:

- a. Program Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi (Target kinerja : 83%) dan Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola (Target kinerja sebesar 10%). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung; dan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan) ; Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL); Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara; Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara; dan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan); Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (sub kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan; dan Koordinasi,

- Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (sub kegiatan : Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati; dan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun (sub kegiatan : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun).
- b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi (Target kinerja sebesar 30503.3 Ha). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi (sub kegiatan : Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi; Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi; Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi; Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi; Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi; dan Perencanaan Pengelolaan TAHURA); Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES); Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (sub Kegiatan: Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi; dan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi).
- c. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase KTH yang meningkat kelasnya dengan target kinerja sebesar 17,7%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan; Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan; dan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial.
- d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas dengan target kinerja sebanyak 4 DAS. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS; Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS; dan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS.



- e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Target kinerja 89,69%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi (sub kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang); Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang (sub Kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota); Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dan Sistem Informasi Penataan Ruang); Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang).

15. **Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan** dengan Indikator Kinerja Persentase Penanganan Sampah dan Persentase Pengurangan Sampah. Target kinerja masing-masing indikator sebesar 60% dan 25%. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

Program Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase pengelolaan sampah dengan Target sebesar 85%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional dengan sub kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional; Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus; Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional; dan Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional).

16. **Sasaran Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan** dengan Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi dengan target kinerja sebesar 15.428 Milyar Rupiah. Realisasi untuk sasaran ini sebesar Rp. 4.186 Milyar Rupiah dengan tingkat capaian sebesar 27,13 persen. Sasaran ini dilaksanakan melalui:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Persentase Peningkatan Minat Investasi dengan target sebesar 5%. Untuk mendukung program ini dilakukan 2 kegiatan dengan 4 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan

- Penanaman. Kegiatan kedua yaitu Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi, Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi dan sub kegiatan Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi.
- b. Program Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal. Target kinerja untuk program ini sebesar 100%. Program ini didukung dengan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi; dan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi.
  - c. Program Pelayanan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan (Target kinerja : 90 %). Adapun kegiatan yang dilakukan sebanyak 2 kegiatan dengan sub kegiatan sebanyak 4 poin. Kegiatan pertama yaitu Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/ kota. Sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini yaitu Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kegiatan kedua yaitu Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi. Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal, dan Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.
  - d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah (Target kinerja: 55 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan didukung 3 sub kegiatan, yaitu Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal, Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
  - e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Urusan pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi. Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan

informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

**17. Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas** dengan Indikator Kinerja Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan dengan target sebesar 23,71%. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Pertumbuhan Populasi Ternak dengan target kinerja 9,5%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor (sub kegiatan : Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan; dan Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan); Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (sub kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain; dan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain); Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi; dan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi); Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak; Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan; dan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak); Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan).
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penataan Prasarana Pertanian (sub kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan; dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya); Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit

Ternak dan Rumpun/Galur Ternak; dan Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak).

- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS dengan target kinerja <1%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis; Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; dan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular); Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan; Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan; dan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi); Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan (sub kegiatan : Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit; Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan; dan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner); Kesejahteraan Hewan (sub kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya).

Penyakit yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah penyakit Rabies (RA), Anthrax (AT), Brucellosis (BRUC), Avian Influenza (AI), Hog Cholera (HC), Septicaemia Epizootica (SE), Surra (SA), Helminthiasis (Hel), dll karena masuk dalam 22 jenis Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026 tahun 2013.

- d. Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian); dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan (sub kegiatan : Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna; Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani; Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani; dan Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani).

- e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitas Sarana Pertanian dengan target kinerja sebesar 1,99%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (sub kegiatan : Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian); dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman (sub kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih; dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura; Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan; dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan).
- f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian dengan target kinerja sebesar 65,56% serta indikator dan Pengembangan Fasilitas Industrialisasi Pertanian dengan target dan capaian 2 unit/paket. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penataan Prasarana Pertanian dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya; dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya.
- g. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI dengan target kinerja sebesar 96%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsid dengan sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
- h. Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok dengan target kinerja sebesar 70%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan : Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN; dan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta); dan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian; dan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani).
- i. Program Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Peningkatan presentase kawasan hutan yang dikelola dengan target kinerja sebesar 10%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan);

Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung; dan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan); Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL); Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara; Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara; dan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan); Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (sub kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan; dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (sub kegiatan : Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati; dan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun (sub kegiatan : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun).

- j. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan target kinerja sebesar 8,74%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (sub kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat; Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil); Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi; dan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi).

- k. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi Perikanan Tangkap dengan target kinerja sebesar 249.099 Ton. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan Mil (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan; Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap; Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap); Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas GT Sampai Dengan GT (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT; Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT; Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT); Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil; dan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh nelayan kecil); Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT; dan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT); Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (sub kegiatan : Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan; Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan); Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas GT sampai dengan GT (sub kegiatan : Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT); Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas GT Sampai Dengan GT (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas GT Sampai Dengan GT; Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT; Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan GT).
- l. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi Perikanan Budidaya dengan target kinerja sebesar 1.219.005 Ton. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penerbitan Izin

- Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan); Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut (sub kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di laut; Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut; Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi).
- m. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan (Target kinerja : 99,92%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan Mil dengan sub kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan Mil; Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan Mil; Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan mil)
- n. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi olahan hasil perikanan dengan target kinerja sebesar 214.373 Ton. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam (satu) daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (sub kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing); Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi; dan Pemberian insentif bagi pelaku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah).

**18.Sasaran Meningkatkan jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin** dengan Indikator Kinerja Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial



dan Kesehatan dengan target kinerja sebesar 100. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi. Target capaian untuk indikator ini sebesar 85%. Program ini didukung melalui 5 kegiatan dan 14 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan, Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan, dan Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan. Kegiatan kedua yaitu penyediaan layana kesehatan untuk KP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga; Pengeloaan Kesehatan Lingkungan; Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus; Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat; Pengelolaan Surveilans Kesehatan; Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota, Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan; Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas; Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten / Kota; operasional Pelayanan Rumah Sakit; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik; Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional; dan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan. Kegiatan ketiga yaitu Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan; dan Pengadaan

Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet. Kegiatan ketiga yaitu Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.

- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan pada Dinas Sosial dengan indikator Kinerja Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal.
- c. Program Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dengan indikator Kinerja Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani (Target kinerja : 3,5 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Alat Bantu; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar); Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (sub kegiatan : Pengasuhan; Penyediaan Makanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial; Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar; Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar ; Anak Terlantar di dalam Panti); Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama yang mudah Diakses; Penyediaan Alat Bantu; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga; Pemulasaraan); Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar; Pemulangan ke Daerah Asal; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti); Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan

NAPZA di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; emberian Bimbingan Keterampilan Dasar; Pemulangan ke Daerah Asal; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA).

- d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial dengan indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana, Bantuan Kebencanaan, Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang meningkat kemampuannya melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, Korban bencana alam yang mendapat layanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang ditingkatkan SDM dan kesejahteraannya, Korban bencana alam penerima bantuan logistic Masyarakat yang menerima bantuan air bersih, SDM petugaspending PKH yang ditingkatkan kompetensinya, dan Pertemuan petugas pendamping dan operator PKH.

**19.Sasaran Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan** dengan Indikator Kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dengan target kinerja sebesar 86,70 poin. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan dengan target kinerja sebesar 79,62%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan; Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur; dan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis dengan target kinerja sebesar 100%. Program ini didukung dengan 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Indikator kinerja untuk program ini adalah Tingkat akurasi data laporan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan.

Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan; Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan; Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan. Kegiatan kedua yaitu Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi dengan indikator kinerja kadar air maksimal cadangan pangan pemerintah. Kegiatan ketiga yaitu Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi. Indikator kinerja untuk program ini adalah tingkat konsumsi energi. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BSA).

- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) dengan target kinerja sebesar 5,77%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi; dan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi.
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan dengan target kinerja sebesar 85%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi; Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan).

**20. Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin** dengan Indikator Kinerja Cakupan Air Minum dengan target kinerja sebesar 78,45% . Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator Kinerja Cakupan air minum dengan target kinerja sebesar 78,45%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; dan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan.

**21. Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin** dengan Indikator Kinerja Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak dengan target kinerja sebesar 80,91%. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar dan target sebesar 97%. Kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
- b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) pada Dinas Perumahan dan Permukiman dengan indikator Kinerja Luas kawasan permukiman yang berkualitas dan target 84.488 Ha. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman; dan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman.

**22. Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin** dengan Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi dengan target kinerja sebesar 99,88%. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengelolaan Energi Terbarukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator Kinerja Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik dengan target kinerja sebesar 5,64%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun; Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun); Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi (sub kegiatan : Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi; Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi ; Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi).
- b. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dengan target

kinerja sebesar 99,88%. Indikator kedua yaitu Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga) dengan indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi); dan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi); Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi); dan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi); Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Pedesaan (sub kegiatan : Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu; dan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan).

**23. Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin** dengan Indikator Kinerja Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) dengan target kinerja sebesar 65,80%. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

Program Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman dengan 2 indikator Kinerja yaitu Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi; dan Rumah tangga yang menempati hunian layak. Target masing-masing indikator yaitu 100% dan 98,86%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (sub kegiatan : Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana; Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi); Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (sub kegiatan : Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana; dan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP); dan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (sub kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana).

**24. Sasaran Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok** dengan Indikator Kinerja Inflasi dengan target kinerja sebesar 3-4%. Realisasi untuk sasaran ini sebesar 1,16 persen sehingga tingkat capaiannya sebesar 161,33 persen. Sasaran ini dilaksanakan melalui:

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting dengan target kinerja sebesar 70%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor (sub kegiatan : Fasilitasi pemenuhan komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik); Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik); Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar (Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya; dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya); Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) (sub kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana) (sub kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA).
- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dengan target kinerja sebesar 4%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor); Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan (sub kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota; dan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi); Pengawasan Pupuk Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan penggunaan Pupuk Berbsubsidi di Wilayah Kerjanya

- dalam sistem informasi perdagangan (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida; Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi; Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi; dan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi).
- c. Program Pengembangan Ekspor pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang dengan target kinerja sebesar 5%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada (satu) daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan Pameran Dagang Internasional/ Nasional; Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor ; Misi Dagang Bagi Pelaku Ekspor Unggulan ; Pameran Dagang Lokal; Peningkatan Citra Produk Ekspor).
  - d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Cakupan Penyelesaian Sengketa dengan target kinerja sebesar 85%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen; Pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen; Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen); Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Fasilitasi penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen; Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan dan/jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen\_; dan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Verifikasi Mutu Produk; Pengembangan Layanan Pengujian; Pengembangan Layanan Sertifikasi; Pengembangan Layanan Kalibrasi).
  - e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja dengan indikator kinerja persentase fasilitasi peningkatan kapasitas pemasaran kelompok UKM dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri (sub kegiatan : Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi); Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (sub kegiatan : Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi); dan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (sub kegiatan : Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri; dan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan).

**25. Sasaran Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup** dengan Indikator Kinerja Pengeluaran per Kapita dengan target kinerja sebesar 11.604 ribu rupiah. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022 dan



atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas dengan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi; Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi; dan Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas.

**26.Sasaran Meningkatkan daya saing pariwisata** dengan Indikator Kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar) dengan target kinerja sebesar 129,78 Milyar Rupiah. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dengan indikator Kinerja Persentase desa wisata yang dikembangkan (target 85,85%) dan persentase geosite yang tertata (target 50%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Kawasan Strategis pariwisata Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi); Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan destinasi pariwisata provinsi); Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata).
- b. Program Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dengan indikator Kinerja efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan dengan target 3.000.000 orang. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dengan sub kegiatan Penguatan promosi melalui media cetak elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri; Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri; Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Dinas Pariwisata dengan indikator Persentase peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif dengan target sebesar 10%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif dengan sub kegiatan Perluasan pasar produk kreatif baik di pasar ekspor maupun

pasar domestik ; Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif; dan Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula.

- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dengan indikator Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang dilatih dengan target kinerja sebesar 70%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Daya Manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan dengan sub kegiatan Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan; Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kamitaraan pariwisata; Pelatihan berbasis kompetensi bidng homestay dan pemandu wisata (tour guide) tingkat lanjutan.

**27.Sasaran Meningkatkan daya saing industri** dengan Indikator Kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar) dengan target kinerja sebesar 173,02 Milyar Rupiah. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Persentase IKM yang Meningkatkan dari Kecil ke Menengah (Target kinerja : 3,14%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi.
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional (Target kinerja : 1%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data

Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas; Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas.

- d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator Kinerja Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha (Target kinerja : 6,35%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan dengan sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan.
- e. Program Pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator Kinerja Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya (Target kinerja : 53,53%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah dengan sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.
- f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan indikator Kinerja Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi (Target kinerja : 100%); dan Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi; Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera; Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi; Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi; Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.

**28.Sasaran Menurunnya pengangguran terbuka** dengan Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target kinerja sebesar 3,19%. Realisasi untuk sasaran ini sebesar 3,92 persen sehingga tingkat capaiannya sebesar 77,12 persen. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase pencari kerja yang

bersertifikat kompetensi dengan target kinerja sebesar 17%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (sub kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi); Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (sub kegiatan : Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja); Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (sub kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (DBHCHT)); Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja).

- b. Program Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan dengan target kinerja sebesar 51,09%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota (sub kegiatan : Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal)); Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (sub kegiatan : Job Fair / Bursa Kerja); Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia; Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran; Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan);Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi).
- c. Program Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perusahaan dengan target kinerja sebesar 22%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di I (Satu) Daerah Provinsi ; Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi); Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK) (sub kegiatan : Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan UMK).
- d. Program Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3 dengan target kinerja sebesar 22%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan sub

kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan; Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan; Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan).

**29. Sasaran Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat** dengan

Indikator Kinerja Persentase penurunan konflik social dengan target kinerja sebesar 20%. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik dengan target kinerja sebesar 10%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan ; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
- b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik dengan target kinerja sebesar 10,53%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Pelaksanaan Kebijakan berupa hibah kepada Lembaga yang difasilitasi, Honorarium Jejaring Deteksi Dini dan Cegah Dini Gangguan Keamanan; Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Pelaksanaan kegiatan berupa Rapat Koordinasi FKDM, Rapat Koordinasi Tim Terpadu PKS, Rapat Tim Pengawasan Orang Asing dan Bimtek Dasar Intelejen; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing,

- Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Output kegiatan berupa Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah.; Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi. Pelaksanaan Kegiatan berupa Honorarium Forkopimda, Honorarium Tim Koordinasi Pembinaan dan Penanggulangan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- c. Program Kesejahteraan Rakyat pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Kinerja Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual (Kali) (sub kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual (Kali); dan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spritual (Lembaga)); Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar (Dokumen) (sub kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pada capaian kinerjanya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen); Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pada capaian kinerjanya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen); Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pada capaian kinerjanya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)); Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (Dokumen) (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dokumen); Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen); Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kemonikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)).
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Kinerja Persentase Lembaga Adat Aktif (target kinerja sebesar 65%); Persentase Bumdes Berprestasi (target kinerja sebesar 27%); Persentase Pokja Posyandu aktif (target kinerja sebesar 80%); Persentase Posyantek yang aktif (target kinerja sebesar 56,41%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang

- Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- e. Program Pengembangan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan (Target kinerja : 72,73%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan); Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya); Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat; Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat).
  - f. Program Pengembangan Kesenian Tradisional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional. Target program ini sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional.
  - g. Program Pembinaan Sejarah dengan indikator Kinerja Cakupan pembinaan sejarah dan Target kinerja 100%. Sub kegiatan yang dilakukan yaitu Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi; dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah.

**30. Sasaran Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah** dengan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah dengan target kinerja sebesar 5,72%. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator Kinerja Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (target kinerja sebesar 100%); dan Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (target kinerja sebesar

- 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan; Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa; Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi; Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia; Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan; Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah); Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (sub kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur); Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS; dan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS).
- b. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) dengan target kinerja sebesar 68,96%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- c. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum pada Biro Hukum dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk;



Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terasilitasi; Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi; Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat; Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun ; Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi; dan Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM. Seluruh target pada indikator tersebut sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan dengan indikator kinerja Persentase fasilitasi dan evaluasi Produk Hukum Daerah, MoU dan Perjanjian Kerjasama. Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan; Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan; pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya; Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota. Kegiatan kedua yaitu Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM dengan indikator kinerja persentase kasus-kasus hukum yang terfasilitasi.

**31. Sasaran Meningkatnya kesadaran politik masyarakat** dengan Indikator Kinerja

Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik dengan target kinerja sebesar 0,9%. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik dengan target kinerja sebesar 90%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.
- b. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase Ormas yang aktif dengan target kinerja sebesar 81,35%. Adapun kegiatan yang

dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

**32.Sasaran Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan** dengan Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan (target kinerja sebesar 19,27%) dan Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak (target kinerja sebesar 80%). Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai triwulan I 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Persentase PD yang menerapkan PPRG dengan target kinerja sebesar 52,17%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi); dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi).
- b. Program Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif dengan target kinerja sebesar 75,52%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi); Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan

- Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota); dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi; dan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi).
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Keluarga (Target kinerja : 5%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi; dan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi.
  - d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Dokumen Gender dengan target kinerja sebesar 1 dokumen. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi.
  - e. Program Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak (target kinerja sebesar 80%) dan Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA (target kinerja sebesar 60%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi.
  - f. Program Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator kinerja Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Target kinerja : 68,15%); dan Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif (target kinerja sebesar 90%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi; dan Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi); dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

(sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi).

Tabel 4.1 Hasil capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
<b>Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah</b>													
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Point	115.83		119.41	-	119.41						
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.65		0.63		0.63						
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%	40.09	14,445,499,395	32.78	4,749,579,691	32.78	3,494,037,000	-	503,333,637	-	14.41	Pelaksana Badan Penanggulan gan Bencana Daerah Provinsi NTB
	Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	92.50		67.34	-	67.34		-				
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	7,543,347,993	100	2,524,923,366	100	1,120,350,000	-	98,830,000	-	8.82	Dinas Sosial
Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas	Point	81.17		79.84		79.84						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
<b>Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar</b>	<b>Persentase Kemantapan jalan</b>	%	<b>86.60</b>		<b>85.36</b>		<b>85.36</b>						
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	86.60	931,804,007,968	85.36	424,968,754,650	85.36	244,934,094,300	-	24,072,369,500	-	9.83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar</b>	<b>Persentase Kemantapan Sistem Irigasi</b>	%	<b>54.50</b>		<b>52.17</b>		<b>52.17</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	76.28	342,401,082,017	75.37	78,749,039,047	75.37	120,731,367,780	-	37,437,000	-	0.03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah</b>	<b>Persentase konektivitas transportasi publik</b>	%	<b>89.14</b>		<b>86.86</b>		<b>86.86</b>						
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	81.63	14,665,159,820	80.40	4,694,778,700	80.40	8,041,109,500	-	305,303,400	-	3.80	Dinas Perhubungan
	Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	100		98.59		98.59		-				
	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	40		35		35		-				

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
	Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	52.58		49.39		49.39		-				
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	66.06	2,260,753,150	61.61	764,484,200	61.61	396,390,500	-	65,462,600	-	16.51	Dinas Perhubungan
<b>Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi</b>													
<b>Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Point</b>	<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>						
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</b>	<b>Opini BPK</b>	<b>Status</b>	<b>WTP</b>		<b>WTP</b>		<b>WTP</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	2,275,817,467,799	100	739,588,857,260	100	889,899,546,404	-	82,867,850,491	-	9.31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan	%	100		100	1,092,593,901	100		-				

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
	APBD Kabupaten/ Kota												
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%	75	5,688,570,834	70	1,849,401,028	70	1,473,114,400	-	254,078,000	-	17.25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	90	3,807,331,659	85	1,281,660,820	85	2,036,779,300	-	185,506,502	-	9.11	INSPEKTORA T
	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	48.89		44.44	2,517,297,403	44.44		-				
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	7.55	1,402,134,356	6.55	472,000,744	6.55	1,654,700,000	-	91,594,000	-	5.54	INSPEKTORA T
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	97		96	1,865,531,280	96		-				
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD</b>	<b>%</b>	<b>38.65</b>		<b>36.97</b>		<b>36.97</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	38.44	1,667,730,000	36.76	554,780,000	36.76	509,772,700	-	-	-	-	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%	54.03	46,183,810,000	52.03	15,363,280,000	52.03	11,372,169,560	-	1,007,963,000	-	8.86	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
<b>Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>Kategori</b>	<b>A (80,01 - 90,00)</b>		<b>BB (76,01 - 80,00)</b>		<b>BB (76,01 - 80,00)</b>						
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	14,444,339,884	100	4,779,893,285	100	1,976,608,100	-	30,336,862	-	1.53	Badan Perencanaan Pembanguna n, Penelitian dan Pengembang an Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	37,833,084,161	100	12,519,651,738	100	6,877,681,600	-	328,061,900	-	4.77	Badan Perencanaan Pembanguna n, Penelitian dan Pengembang an Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase PD yang Meningkat Nilai Implementasi SAKIP-nya	%	100	2,916,865,961	91.11	981,904,708	91.11	2,036,779,300	-	185,506,502	-	9.11	INSPEKTORA T
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	26,66	2,529,078,823	22,22	851,362,983	22,22	1,654,700,000	-	91,594,000	-	5.54	INSPEKTORA T
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%		3,842,393,557		1,282,219,090		1,875,005,200	-	136,425,800	-	7.28	Biro Organisasi

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	9,485,045,504	100	3,165,190,197	100	877,022,800	-	150,875,801	-	17.20	Biro Pemerintahan
<b>Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN</b>	<b>Indeks Profesionalisme ASN</b>	<b>Point</b>	<b>0.72</b>		<b>0.70</b>		<b>0.70</b>						
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai	19	21,515,000,000	16	7,150,000,000	16	1,484,356,000	-	271,459,000	-	18.29	Badan Kepegawaian Daerah
	Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan		80		80		80		-				
	Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi		135		88		88		-				
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan		136		132		132		-				
	Nilai Aspek Sistem Informasi		19		16		16		-				
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0.10	51,655,240,040	0.09	16,960,960,998	0.09	3,844,998,460	-	215,249,418	-	5.60	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0.04		0.04		0.04		-				

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0.15		0.14		0.14		-				
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0.62		0.59		0.59		-				
<b>Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat</b>	<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	<b>Point</b>	<b>4.55</b>		<b>4.53</b>		<b>4.53</b>						
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%	98,90	880,122,000	98,80	290,696,000	98,80	54,429,000	-	4,990,000	-	9.17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	654,257,000	100	216,094,000	100	27,944,700	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%	100	3,155,081,000	100	1,042,092,000	100	203,607,300	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2022						
			Target	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
													Pencatatan Sipil
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkar hutan dan pesisir	%	25	266,644,000	20	100,000,000	20	19,479,000	-	-	-	-	Dinas Pemberdaya an Masyarakat, Pemerintah an Desa, Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%	80	16,947,033,421	70	5,599,748,172	70	6,831,312,500	-	196,709,300	-	2.88	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	65	6,229,379,686	55	2,058,351,845	55	992,930,000	-	3,089,000	-	0.31	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	30	1,530,744,809	25	505,798,581	25	200,000,000	-	7,510,400	-	3.76	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	50	1,492,430,577	40	493,138,545	40	340,720,000	-	23,341,000	-	6.85	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	90	300,351,716	85	100,214,713	85	105,981,900	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	3,405,712,853	100	1,135,237,618	100	16,428,713,500	-	10,176,250	-	0.06	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	624,349,821	100	208,116,607	100	201,835,400	-	6,346,000	-	3.14	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	Orang	43,000	-	41,000	-	41,000	532,350,000	-	74,360,000	-	13.97	Badan Penghubung Daerah
<b>Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah</b>													
Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan kehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan	Point	73.05		72.43		72.43						
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67.48		67.08		67.08						
PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase fasilitas kehatan yang terakreditasi	%	85	490,192,636,948	85	163,526,294,113	85	755,199,774,800	-	37,750,282,869	-	5.00	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2022				Kinerja	Keu (Rp.)	
			Target	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	97		97		97		-				
	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar	%	80		75		75		-				
	Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100		100		100		-				
	Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	%	100		90		90		-				
	Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100		97		97		-				
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang	%	100		100		100		-				

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
	menggunakan obat rasional												
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	3	3,651,104,864	2.5	1,391,035,404	2.5	26,748,472,984	-	5,135,711,100	-	19.20	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%	95	239,953,724	90	100,000,000	90	100,229,387	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	90	163,139,610,602	85	54,518,919,382	85	519,845,818,280	-	-	-	-	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	76.19	29,809,896,151	75	10,339,417,902	75	5,965,829,184	-	-	-	-	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80	-	80	-	80	-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	80.00	144,479,341,067	78.00	48,764,835,901	78.00	8,608,668,868	-	-	-	-	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
<b>Sasaran 1: Meningkatnya</b>	<b>Persentase Balita Stunting</b>	<b>%</b>	<b>30.49</b>		<b>30.99</b>		<b>30.99</b>						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
derajat kesehatan dan gizi masyarakat													
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita Wasting	%	10.41	-	11.41	163,526,294,113	11.41	755,199,774,800	-	37,750,282,869	-	5.00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%	80	5,059,563,209	70	1,844,102,816	70	350,000,000	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
<b>Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing</b>	<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>Point</b>	<b>63.10</b>		<b>62.74</b>		<b>62.74</b>						
<b>Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan</b>	<b>Harapan Lama Sekolah</b>	<b>Tahun</b>	<b>13.79</b>		<b>13.73</b>		<b>13.73</b>						
	<b>Rata rata Lama Sekolah</b>	<b>Tahun</b>	<b>7.07</b>		<b>7.04</b>		<b>7.04</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/P aket C	%	100	1,486,214,496,782	99.95	496,806,046,231	99.95	532,259,800,120	-	49,120,640	-	0.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/P aket C	%	95.28		94.38		94.38		-				
	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	98.02		97.57		97.57		-				



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2022						
			Target	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70,6		70		70		-				
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1		1		1		-				
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	18		1:18		1:18		-				
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	1:10		1:12		1:12		-				
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum	%	100	1,986,884,736	100	696,067,714	100	193,966,500	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	208,215,004,195	100	69,288,275,305	100	76,383,604,080	-	11,584,055,500	-	15.17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100		99.58		99.58		-				
	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	100		100		100		-				
	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	100		60		60		-				

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		80		6		6		-				
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	6.5	194,889,101	100	65,788,824	100	117,631,600	-	8,005,600	-	6.81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	100	831,855,187	35	309,938,698	35	-	-	-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	11,296,717,332	100	3,711,881,596	100	3,684,230,790	-	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		100		100		-				
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Altlet Berprestasi	%	100	31,488,202,013	100	10,438,816,493	100	11,419,729,740	-	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan</b>													
<b>Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>Point</b>	<b>68.46</b>		<b>68.22</b>		<b>68.22</b>						
<b>Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Air</b>	<b>Point</b>	<b>43.03</b>		<b>42.93</b>		<b>42.93</b>						
	<b>Indeks Kualitas Udara</b>	<b>Point</b>	<b>87.59</b>		<b>87.56</b>		<b>87.56</b>						
	<b>Indeks Kualitas Air Laut</b>	<b>Point</b>	<b>71.48</b>		<b>70.89</b>		<b>70.89</b>						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	24.242424	1,024,902,303	24.24	337,210,648	24.24	191,282,000	21.43	32,428,116	88.40	16.95	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	30	2,835,284,286	10	932,857,745	10	1,280,660,882	-	114,110,000	-	8.91	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi	3	232,926,464	1	100,000,000	1	150,004,200	-	2,200,000	-	1.47	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit	210	232,426,464	210	100,000,000	210	23,221,000	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/ kegiatan	30	605,251,864	25	199,138,369	25	1,178,947,900	-	13,042,067	-	1.11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%	10	632,449,873	10	208,086,986	10	650,008,600	-	6,924,000	-	1.07	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok	0	#VALUE!	0	-	0	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	60	641,333,479	20	211,009,847	20	71,049,900	-	9,619,800	-	13.54	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Tutupan Lahan</b>	<b>Point</b>	<b>69.70</b>		<b>68.70</b>		<b>68.70</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	100	61,710,986,449	83	20,303,985,721	83	50,028,548,777	41	464,601,496	49.17	0.93	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	30	-	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30.503	2,843,299,456	30.503	935,494,875	30.503	564,982,100	32.25	18,340,200	105.73	3.25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	48.67	2,125,242,316	17.70	699,241,612	17.70	868,140,800	-	2,971,900	-	0.34	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	4.00	14,296,328,273	4.00	4,703,740,157	4.00	15,559,240,800	-	37,870,200	-	0.24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	90.31	3,017,590,900	89.69	892,236,000	89.69	344,000,000	-	7,356,900	-	2.14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Neraca pengelolaan sampah (%)	%	100.00		85.00		85.00						
Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	70.00		60.00		60.00						
	Persentase Pengurangan Sampah	%	30.00		25.00		25.00						
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%	100	15,916,448,484	85	5,299,032,825	85	18,015,308,800	47.91	5,598,427,928	56.36	31.08	Dinas Lingkungan Hidup dan Keputusan
<b>Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi</b>													
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli (Point)	%	75.56		74.68		74.68						
Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	17,814		15,428		15,428		4,186		27.13		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perentase Peningkatan Minat Investasi	Persen	60	1,099,303,769	5	596,026,769	5	751,405,860	-	16,314,500	-	2.17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen	100	2,628,846,723	100.00	863,871,915	100.00	665,537,840	-	2,880,000	-	0.43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	93	1,953,548,364	90	641,960,427	90	321,555,800	-	19,736,500	-	6.14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen	60	2,702,918,671	55	888,212,883	55	676,208,000	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen	100	428,183,869	100	140,706,575	100	49,457,600	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas</b>	<b>Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan &amp; kehutanan</b>	<b>%</b>	<b>23.88</b>		<b>23.71</b>		<b>23.71</b>						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%	10	135,417,101,158	9.5	44,798,298,458	9.5	30,154,402,360	-	635,153,700	-	2.11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	%	100	1,707,732,485	100	564,947,181	100	372,850,000	-	-	-	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS	%	< 1	8,463,555,546	< 1	2,799,889,261	< 1	1,887,931,968	-	91,333,010	-	4.84	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%	100	1,278,805,431	100	423,050,759	100	545,921,600	-	28,223,000	-	5.17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	%	2.05	64,204,913,319	1.99	19,956,291,589	1.99	19,553,044,615	-	188,110,500	-	0.96	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%	96.79	267,360,989,055	65.56	79,975,449,202	65.56	96,658,180,131	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/ paket	10	-	2	-	2	-	-	-	-	#DIV/0!	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	96.5	1,229,042,136	96	434,192,818	96	471,430,600	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	100	18,894,573,000	70	6,731,344,000	70	5,409,650,500	-	333,176,820	-	6.16	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	30	-	10	-	10	50,028,548,777	-	464,601,496	-	0.93	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	9.5	15,330,163,046	8.74	4,909,615,839	8.74	6,635,800,500	-	32,445,793	-	0.49	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	256,572	11,895,178,174	249,099	8,708,211,521	249,099	12,819,149,980	-	5,040,000	-	0.04	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1,243,385	32,728,577,394	1,219,005	3,795,727,604	1,219,005	8,019,722,100	-	40,735,000	-	0.51	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang- undangan	%	99.93	8,942,779,585	99.92	1,962,524,606	99.92	3,128,015,000	-	14,657,000	-	0.47	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	215700	2,897,006,721	214373	1,352,738,477	214373	115,306,480	-	4,720,000	-	4.09	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>Sasaran 3: Meningkatnya jaminan kesehatan</b>	<b>Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>						



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
<b>dan sosial bagi penduduk miskin</b>	<b>jaminan Sosial dan Kesehatan (%)</b>												
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	-	85	163,526,294,113	85	755,199,774,800	-	37,750,282,869	-	5.00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	2,356,150,635	100	788,655,091	100	565,115,400	-	61,052,939	-	10.80	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	4.5	53,397,902,044	3.5	17,873,444,354	3.5	14,736,613,440	-	1,237,723,505	-	8.40	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	37,283,915,612	100	12,479,741,066	100	8,105,190,000	-	-	-	-	Dinas Sosial
<b>Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan</b>	<b>Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi</b>	<b>Skor</b>	<b>87.20</b>		<b>86.70</b>		<b>86.70</b>						
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Lambung Pangan yang termanfaatkan	%	86.62	770,871,786	79.62	300,963,367	79.62	-	-	-			Dinas Ketahanan Pangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100	11,466,150,864	100	3,778,523,930	100	2,800,546,700	-	42,790,450	-	1.53	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	3.77	1,141,837,902	5.77	358,435,000	5.77	465,253,000	-	6,660,000	-	1.43	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	90.00	1,857,153,698	85.00	679,047,614	85.00	407,422,780	-	927,500	-	0.23	Dinas Ketahanan Pangan
<b>Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>	<b>Cakupan Air Minum</b>	<b>%</b>	<b>80.59</b>		<b>78.45</b>		<b>78.45</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	80.59	10,224,348,000	78.45	3,337,898,000	78.45	4,256,965,100	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>	<b>Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak</b>	<b>%</b>	<b>82.46</b>		<b>80.91</b>		<b>80.91</b>						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100	-	97.00	163,526,294,113	97.00	755,199,774,800	-	37,750,282,869	-	5.00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	253391.4	587,290,665,869	84,488	163,032,669,005	84,488	252,160,811,500	-	76,061,324	-	0.03	Dinas Perumahan dan Permukiman

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
UTILITAS UMUM (PSU)													
<b>Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>	<b>Rasio Elektrifikasi</b>	<b>%</b>	<b>99.99</b>		<b>99.88</b>		<b>99.88</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%	5.57	1,991,688,898	5.64	643,295,009	5.64	206,885,000	-	13,699,700	-	6.62	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	99.99	5,546,102,425	99.88	1,791,333,986	99.88	658,882,900	-	13,340,000	-	2.02	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>	<b>Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)</b>	<b>%</b>	<b>68.95</b>		<b>65.80</b>		<b>65.80</b>						
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	7,063,959,946	100	2,526,185,090	100	494,160,300	-	5,794,000	-	1.17	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Rumah tangga menempati hunian layak	%	98.91	-	98.86		98.86		-				
<b>Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok</b>	<b>Inflasi</b>	<b>%</b>	<b>3,0 - 4,0</b>		<b>3,0 - 4,0</b>		<b>3,0 - 4,0</b>		<b>1.16</b>		<b>161.33</b>		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%	80	874,409,856	70	289,831,387	70	373,118,500	-	-	-	-	Dinas Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	5,179,316,326	4	1,716,733,208	4	299,496,600	-	-	-	-	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	7	4,070,555,572	5	1,349,224,006	5	1,709,758,500	-	-	-	-	Dinas Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%	90	3,914,544,303	85	1,297,512,601	85	2,354,264,400	-	655,950,000	-	27.86	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	37,550,068,505	100	12,446,324,087	100	4,095,552,400	-	130,500,000	-	3.19	Dinas Perdagangan
<b>Sasaran 7: Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup</b>	<b>Pengeluaran per kapita (Rp.000)</b>	<b>Rp.000</b>	<b>11,944</b>		<b>11,604</b>		<b>11,604</b>						
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	4,833,875,000	100	490,000,000	100	7,188,888,300	-	-	-	-	Dinas Perdagangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
Tujuan 2: Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)	%	4.50		3.00		3.00						
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Milyar	137.24		129.78		129.78						
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	%	100	16,580,012,830	85.85	5,503,206,408	85.85	3,487,678,900	-	15,361,880	-	0.44	Dinas Pariwisata
	Persentase Geosite yang tertata	%	50	-	50	-	50	-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang		7,391,905,747		2,446,751,761		2,110,840,000	-	49,660,000	-	2.35	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%		606,633,173		209,889,754		305,160,000	-	50,242,000	-	16.46	Dinas Pariwisata

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%		3,506,228,054		1,160,576,170		36,950,000	-	-	-	-	Dinas Pariwisata
<b>Tujuan 3: Terwujudnya perindustrian yang unggul</b>	<b>Pertumbuhan Industri (%)</b>	<b>%</b>	<b>9.00</b>		<b>7.50</b>		<b>7.50</b>						
<b>Sasaran 1: Meningkatnya daya saing industri</b>	<b>Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)</b>	<b>Rp. Miliar</b>	<b>179.91</b>		<b>173.02</b>		<b>173.02</b>						
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	102,322,211,223	100	35,280,281,729	100	14,583,688,397	-	550,000,000	-	3.77	Dinas Perindustria n
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah	%	3.55	3,018,338,892	3.14	1,040,710,958	3.14	1,435,467,400	-	-	-	-	Dinas Perindustria n
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	2,043,024,494	1	704,426,525	1	847,948,000	-	-	-	-	Dinas Perindustria n
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%	6.71	4,806,536,363	6.35	1,597,038,675	6.35	3,713,152,000	-	2,275,800	-	0.06	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan	%	56.75	7,967,004,066	53.53	2,647,148,104	53.53	2,589,351,600	-	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
	kapasitas usahanya												dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	11,296,717,332	100	3,711,881,596	100	3,684,230,790	-	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100	-	100		100		-				
<b>Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>%</b>	<b>3.17</b>		<b>3.19</b>		<b>3.19</b>		<b>3.92</b>		<b>77.12</b>		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	18	3,481,991,780	17	1,232,588,784	17	1,449,999,520	-	19,920,000	-	1.37	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	57.48	3,391,251,944	51.09	1,115,004,981	51.09	940,019,600	-	29,241,000	-	3.11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	23	1,025,630,908	22	337,215,751	22	1,007,000,000	-	25,576,300	-	2.54	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	23	3,466,483,656	22	1,139,740,311	22	906,558,960	-	50,390,000	-	5.56	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan</b>													

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
<b>Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani</b>	<b>Indeks Kriminalitas</b>	<b>Point</b>	<b>13.25</b>		<b>14.05</b>		<b>14.05</b>						
<b>Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Sosial Budaya &amp; Toleransi Masyarakat</b>	<b>Persentase penurunan konflik sosial</b>	<b>%</b>	<b>0.00</b>		<b>20.00</b>		<b>20.00</b>						
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	1,526,591,849	10	506,635,309	10	450,000,000	-	45,445,400	-	10.10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	11.43	11,105,209,927	10.53	3,685,524,366	10.53	6,102,590,400	-	666,132,150	-	10.92	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	292,643,073,798	100	97,655,935,112	100	65,002,266,600	-	153,843,300	-	0.24	Biro Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Persentase Lembaga Adat Aktif	%	70	24,519,090,462	65	8,086,485,113	65	3,525,999,900	-	725,905,000	-	20.59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
MASYARAKAT HUKUM ADAT													Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
	Persentase Bumdes Berprestasi	%	37	-	27	-	27	-	-	-	-	-	
	Persentase Pokja Posyandu aktif	%	100	-	80	-	80	-	-	-	-	-	
	Persentase Posyantek yang aktif	%	64.96	-	56.41	-	56.41	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	81.82	6,405,431,759	72.73	2,173,198,075	72.73	2,407,930,000	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	1,426,928,736	100	508,873,145	100	125,000,000	-	11,620,000	-	9.30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	%	100	719,796,541	100	272,477,237	100	124,997,700	-	18,137,493	-	14.51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas &amp; Pegakan Produk Hukum Daerah</b>	<b>Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah</b>	<b>%</b>	<b>6.07</b>		<b>5.72</b>		<b>5.72</b>						
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100.00	11,445,268,038	100.00	3,932,903,666	100.00	3,060,347,000	-	208,036,508	-	6.80	Satuan Polisi Pamong Praja

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	86.21	2,436,780,947	68.96	808,702,907	68.96	397,455,000	-	53,535,000	-	13.47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%	100	5,727,596,770	100	1,911,317,467	100	984,271,300	-	169,157,415	-	17.19	Biro Hukum
	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi	%	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	
	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	
	Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%	100	-	100		100		-				
<b>Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani</b>	<b>Partisipasi Politik Masyarakat (%)</b>	%	<b>85.20</b>		<b>84.57</b>		<b>84.57</b>						
<b>Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik masyarakat</b>	<b>Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik</b>	%	<b>1.00</b>		<b>0.90</b>		<b>0.90</b>						
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	100	43,528,305,431	90	5,153,432,345	90	4,166,297,600	-	29,905,000	-	0.72	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	%	83.01	1,631,097,489	81.35	541,317,956	81.35	604,060,000	-	31,320,000	-	5.18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
<b>Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani</b>	<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>	<b>Point</b>	<b>61.4</b>		<b>61.16</b>		<b>61.16</b>						
<b>Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi</b>	<b>Persentase Partisipasi Perempuan</b>	%	<b>20.47</b>		<b>19.27</b>		<b>19.27</b>						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp)	2022		2022		Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
Perempuan dalam Pembangunan	dalam Pembangunan												
	Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	100		80		80						
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	65.28	6,231,111,760	52.17	2,021,592,521	52.17	818,824,700	16.67	4,370,000	31.95	0.53	Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	83.07	2,837,249,127	75.52	920,503,730	75.52	369,017,700	16.67	960,000	22.07	0.26	Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	%	15	1,340,778,150	5	434,995,741	5	226,417,200	-	-	-	-	Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalia n Penduduk

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2022						
			Target	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp.)	Kinerja	Pagu (Rp)	
													dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender		1	200,537,840	1	75,000,000	1	37,994,600	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	42.00	1,490,733,752	80.00	512,037,084	80.00	385,272,800	-	4,745,000	-	1.23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	%		-		-			-				
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		2,123,868,384		727,588,084		491,553,900	-	4,960,000	-	1.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RESNTRA		Target Dalam RKPD		Target Dalam APBD		Realisasi Sampai Tw I		Tingkat Capaian (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2022							
					Target	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp.)		Kinerja
													dan Keluarga Berencana	
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif	%								-				

## Capaian RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sampai tahun 2022

Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, telah ditetapkan sebanyak 103 Indikator Kinerja Daerah (IKD) tersebut sampai dengan tahun 2022 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

### 4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Pada tahun 2022 tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1.  
Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2022	
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (Point)			Point	119.41	
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.63	
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas				Point	79.84
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	85.36	
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	52.17	
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	86.86	
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	BB	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	36.97	
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (76,01 - 80,00)	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2022
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.70
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.53
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			Point	72.43
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67.08
					Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	30.99
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan			Point	62.74
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.73
					Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7.04
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	68.22
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	42.93
					Indeks Kualitas Udara	Point	87.56
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	70.89
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan		Point	68.70	
			Neraca pengelolaan sampah			%	85.00
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	60.00
					Persentase Pengurangan Sampah	%	25.00
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas		Indeks Daya Beli			Point
			Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)		Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	15,428
			Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.71
			Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin		Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100
			Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan		Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.70
					Cakupan Air Minum	%	78.45



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2022		
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.91		
					Rasio Elektrifikasi	%	99.88		
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	65.80		
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0		
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11,604		
				Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)			%	3.00
					Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	129.78	
				Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	7.50
					Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	173.02	
					Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.19	
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	14.05		
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	20.00		
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.72		
				Partisipasi politik masyarakat			%	84.57	
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.90		
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				Point	61.16	
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	19.27		
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80		

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2022

Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022, 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja berdasarkan tabel diatas ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur pada tahun 2022. Adapun tingkat capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap Misi dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2.  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

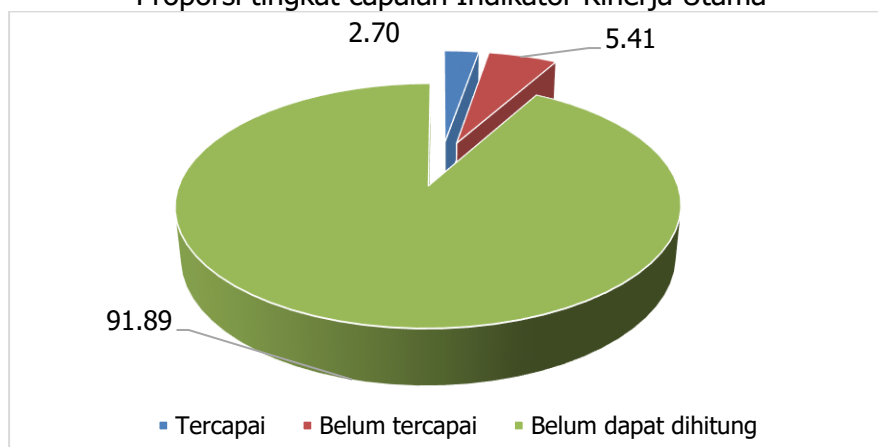
No	Indikator	Satuan	2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023	OPD Pelaksana
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian		
1	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.63			0.65	BPBD, Dinsos
2	Persentase Kemantapan jalan	%	85.36			86.6	Dinas PUPR
3	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	52.17			54.50	Dinas PUPR
4	Persentase konektivitas transportasi publik	%	86.86			89.14	Dishub
5	Opini BPK	Status	WTP			WTP	BPKAD
6	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	36.97			38.65	Bappeda
7	Nilai SAKIP		BB (76,01 - 80,00)			A (80,01 - 90,00)	Biro Organisasi, Inspektorat, Bappeda
8	Indeks Profesionalisme ASN		0.70			0.72	BKD, BPSDM
9	Indeks Pelayanan Publik		4.53			4.55	Biro Organisasi, DMPTSP, Bappeda, Diskominfotik, Rumah Sakit
10	Angka Harapan Hidup		67.08			67.48	Dinkes, Rumah Sakit
11	Persentase Balita Stunting	%	30.99			30.49	Dinkes
12	Harapan Lama Sekolah		13.73			13.79	Dinas Dikbud
13	Rata rata Lama Sekolah		7.04			7.07	Dinas Dikbud
14	Indeks Kualitas Air		42.93			43.03	Dinas LHK
15	Indeks Kualitas Udara		87.56			87.59	Dinas LHK
16	Indeks Kualitas Air Laut		70.89			71.48	Dinas LHK
17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		68.70			69.70	Dinas LHK
18	Persentase Penanganan Sampah	%	60.00			70.00	Dinas LHK
19	Persentase Pengurangan Sampah	%	25.00			30.00	Dinas LHK
20	Nilai Realisasi Investasi		15,428	4,186	27.13	17,814	DPMPTSP
21	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.71			23.88	Distambun, Disnakeswan, Dislutkan, Dinas LHK
22	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100.00			100.00	Dinkes, Dinsos
23	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		86.70			87.20	DKP
24	Cakupan Air Minum	%	78.45			80.59	Dinas PUPR
25	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.91			82.46	Dinas PUPR, Dinkes, Dinas Perkim

No	Indikator	Satuan	2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023	OPD Pelaksana
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian		
26	Rasio Elektrifikasi	%	99.88			99.99	Dinas ESDM
27	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	65.80			68.95	Dinas Perkim
28	Inflasi	%	3,0 - 4,0	1.16	161.33	3,0 - 4,0	Disdag, Biro Perekonomian
29	Pengeluaran per kapita		11,603.52			11,943.70	Disdag
30	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi & Makan Minum)		129.78			137.24	Dispar
31	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan		173.02			179.91	Disperin
32	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.19	3.92	77.12	3.17	Disnakertrans
33	Persentase penurunan konflik sosial	%	20.00			0.00	Bakesbangpol
34	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.72			6.07	Satpolpp
35	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.90			1.00	Bakesbangpol
36	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	19.27			20.47	DP3AP2KB
37	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80.00			100.00	DP3AP2KB

Sumber: Kemen-LHK, KemenPAN RB, BPS dan Perangkat Daerah Provinsi NTB

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja pada tahun 2022, diketahui bahwa terdapat 3 indikator yang sudah dapat dihitung tingkat capaiannya dan 34 indikator yang lain masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Diantara 3 indikator yang telah dapat dihitung tingkat capaiannya pada Triwulan I 2021 tersebut adalah Nilai Realisasi Investasi, Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Meskipun belum ada indikator yang memenuhi target, namun capaian indikator dari sasaran pembangunan NTB tersebut on the track.

Grafik. 3. 1.  
Proporsi tingkat capaian Indikator Kinerja Utama



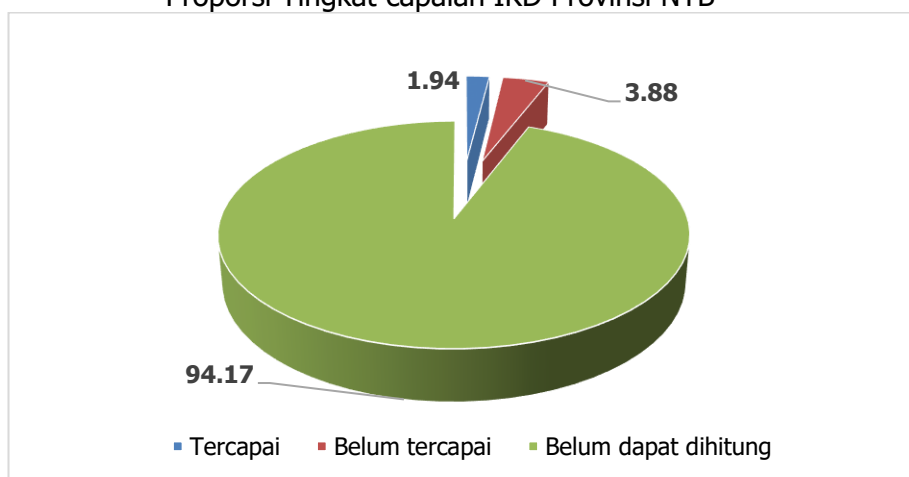
Sumber: data diolah

## 4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Salah satu parameter keberhasilan pembangunan yang menunjukkan gambaran pencapaian pembangunan Daerah dan sebagai tolok ukur sejauh mana program-program yang digulirkan Pemerintah dapat mencapai sasaran-sasaran atau tujuan pembangunan, dapat diukur melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKD juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Capaian terhadap 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi NTB tahun 2022 secara keseluruhan terdapat 2 indikator atau 1,94 persen tercapai sesuai target bahkan melampaui, 4 indikator belum memenuhi target atau 3,88 persen dan masih terdapat 97 indikator belum tersedia (*Not Available/NA*) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

Grafik. 3. 2.  
Proporsi Tingkat capaian IKD Provinsi NTB



Sumber: data diolah

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 103 indikator untuk mendeskripsikan ukuran kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu :

### 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan 5 indikator kinerja meliputi indikator Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam, Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Adapun capaian indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

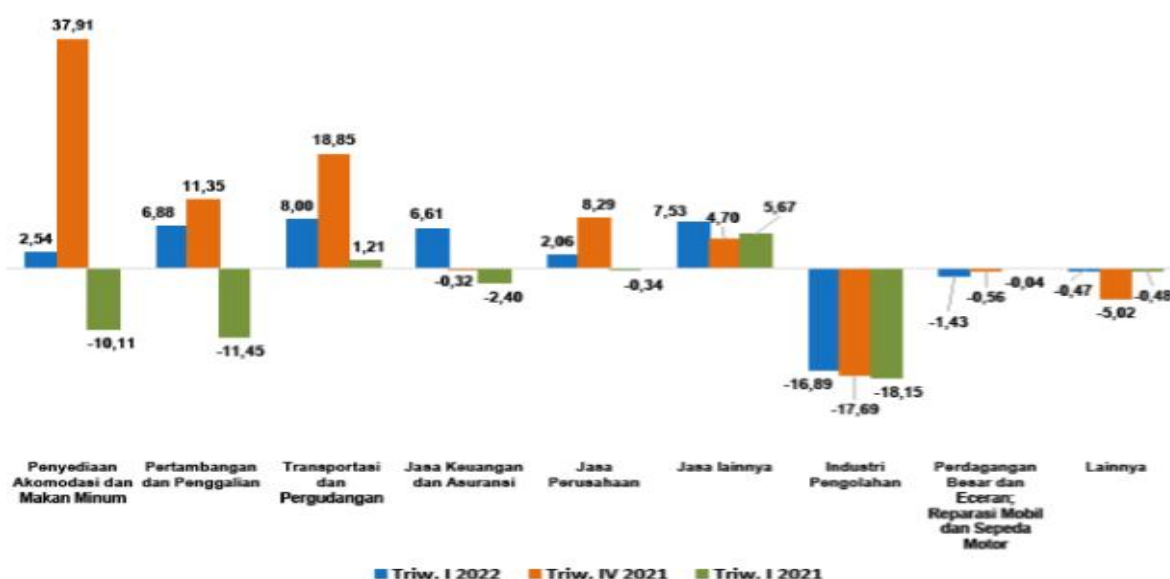
Tabel 3. 3.  
Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
<b>A</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>				
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	3,5-4,5	5.15	196.19
2	Inflasi	%	3,0 - 4,0	1.16	161.33
3	Tingkat Kemiskinan	%	12.77		0.00
4	Gini Ratio	Point	0.329		200.00
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	69.39		0.00

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2022

Berdasarkan data hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan I-2022 dibanding Triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 0,92 persen ( q-to-q ). Pertumbuhan terjadi pada 9 (sembilan) lapangan usaha, sedangkan 8 (delapan) lapangan usaha lainnya terkontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,28 persen, diikuti oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,00 persen; Jasa Lainnya sebesar 7,53 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,88 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,61 persen. Di sisi lain, lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam adalah Konstruksi sebesar 19,44 persen. Selain itu, lapangan usaha yang terkontraksi adalah Industri Pengolahan sebesar 16,89 persen; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,20 persen.

Grafik. 3. 3.  
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)



Sumber: BPS Provinsi NTB

Pada indikator inflasi terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,68 pada Bulan Maret 2022 menjadi 108,93 pada Bulan April 2022. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi NTB, perkembangan harga berbagai komoditas secara umum menunjukkan peningkatan. Pada Bulan April 2022, inflasi Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) sebesar 1,16 persen, atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,68 pada Bulan Maret 2022 menjadi 108,93 pada Bulan April 2022. Dengan angka inflasi tersebut, maka laju inflasi Gabungan tahun kalender (April 2022 terhadap Desember 2021) sebesar 2,79 persen dan laju inflasi 'tahun ke tahun' (April 2022 terhadap April 2021) sebesar 3,81 persen.

Inflasi Gabungan Dua Kota Bulan April 2022 sebesar 1,16 persen terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Transportasi sebesar 3,25 persen; Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,72 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 1,40 persen; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,87 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,84 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,34 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,12 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,06 persen; dan Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,49 persen dan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,03 persen.

Lima komoditas yang mengalami kenaikan harga tertinggi di Bulan April 2022 ini antara lain Angkutan Udara, Minyak Goreng, Bensin, Daging Ayam Ras, dan Kue Kering Berminyak. Sedangkan lima komoditas yang mengalami penurunan harga terbesar antara lain Cabai Rawit, Beras, Ikan Layang/Ikan Benggol, Cumi-cumi, dan Jeruk.

## 2. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing Provinsi NTB diukur menggunakan pendekatan 8 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 4.  
Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
<b>B</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>				
6	Indeks Kriminalitas	Point	14.05		200.00
7	Indeks Aksesibilitas	Point	79.84		0.00
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	68.00		0.00
9	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana	%	89.69		0.00
10	Indeks Risiko Bencana	Point	119.41		200.00
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	BB		100
12	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.53		0.00

Sumber: Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2022

Terdapat 7 indikator untuk mengukur aspek daya saing daerah, yaitu Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesabilitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, Indeks Resiko Bencana dan Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Pelayanan Publik. Seluruh indikator pada Aspek Daya Saing Daerah capaiannya belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan mewujudkan kondusifitas daerah, menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menyiapkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mewujudkan pelayanan publik yang paripurna.

### 3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum merupakan bagian dari pelayanan publik baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab atau urusan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Terdapat 91 indikator kinerja untuk mengukur pelayanan umum yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 21 indikator yang tersebar pada 6 urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 32 indikator yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan 20 indikator yang tersebar pada 8 urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 18 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan. Adapun tingkat capaian indikator-indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 5.  
Capaian Indikator pada Aspek Pelayanan Umum

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
<b>C</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>				
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				
<b>1.01</b>	<b>Pendidikan</b>				
1	Indeks Pendidikan	Point	62.74		0.00
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.73		0.00
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.04		0.00
<b>1.02</b>	<b>Kesehatan</b>				
4	Indeks Kesehatan	Point	72.43		0.00
5	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	80.00		0.00
6	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.91		0.00
7	Angka Harapan Hidup	Tahun	67.08		0.00
8	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	30.99		0.00
9	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	%	100		0
<b>1.03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
10	Persentase Kemantapan jalan	%	85.36		0.00
11	Cakupan Air Minum	%	78.45		0.00
12	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	52.17		0.00
13	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	18.18		0.00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
<b>1.04</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>				
14	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	65.80		0.00
<b>1.05</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>				
15	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.72		-
15	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100.00		-
16	Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100.00		-
17	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	25.58		-
18	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.63		-
<b>1.06</b>	<b>Sosial</b>				
19	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	100.00		-
20	Persentase PMKS yang tertangani	%	5.12		0.00
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>				
<b>2.01</b>	<b>Tenaga Kerja</b>				
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.19	3.92	77.12
<b>2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
22	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	61.16		0.00
23	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	90.49		0.00
24	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20.90		0.00
25	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	19.27		0.00
26	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80.00		0.00
<b>2.03</b>	<b>Pangan</b>				
27	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.70		0.00
<b>2.04</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>				
28	Indeks Kualitas Air	Point	42.93		0.00
29	Indeks Kualitas Udara	Point	87.56		0.00
30	Indeks Kualitas Air Laut	Point	87.63		0.00
31	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	85.00		0.00
32	Persentase Penanganan Sampah	%	60.00		0
33	Persentase Pengurangan Sampah	%	25.00		0
<b>2.05</b>	<b>Pertanahan</b>				
34	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100.00		0
<b>2.06</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
35	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	rasio	0.86		0.00
<b>35</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>				
36	Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan	%	31.28		0.00
37	Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri	%	88.00		0.00
<b>2.08</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>				
38	Pertumbuhan Penduduk	%	1.00		200.00



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
<b>2.09</b>	<b>Perhubungan</b>				
39	Persentase konektivitas transportasi publik	%	86.86		0.00
<b>2.10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>				
40	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Kualifikasi	Transaksi		101.38
41	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	65		0.00
<b>2.11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>				
42	Persentase Koperasi Aktif	%	67.00		0.00
<b>2.12</b>	<b>Penanaman Modal</b>				
43	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	15,428	Rp 4,186	27.13
<b>2.13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>				
44	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	40		0.00
45	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15		0.00
46	Proporsi wirausaha muda	%	68.28		0.00
<b>2.14</b>	<b>Statistik</b>				
47	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	50.00		0.00
<b>2.15</b>	<b>Persandian</b>				
48	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	III		81.6
<b>2.16</b>	<b>Kebudayaan</b>				
49	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	28.70		0.00
<b>2.17</b>	<b>Perpustakaan</b>				
50	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	100.00		0.00
51	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	35.87		0.00
<b>2.18</b>	<b>Kearsipan</b>				
52	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	83.33		0.00
<b>3</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>				
<b>3.01</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>				
53	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4.75		0.00
54	Produksi Perikanan	Ton	1,468,104		0.00
55	Nilai Tukar Nelayan	%	>110		0.00
<b>3.02</b>	<b>Pariwisata</b>				
56	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	3.00		-
57	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	80.00		-
58	Rata-rata Lama Menginap	hari	3.25	2.11	64.92
59	Angka kunjungan wisatawan	orang	4,850,000		0.00
60	Persentase Geosites yang Tertata	%	37.50		0.00
61	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Milyar	129.78		-
<b>3.03</b>	<b>Pertanian</b>				
62	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.71		0.00
63	Nilai Tukar Petani	Point	>105	104.75	99.76
<b>3.04</b>	<b>Kehutanan</b>				
64	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	68.70		0.00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
65	Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya	%	15.08		0.00
<b>3.05</b>	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>				
66	Rasio Elektrifikasi	%	99.88		0.00
<b>3.06</b>	<b>Perdagangan</b>				
67	Indeks Daya Beli	Point	74.68		0.00
68	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11,604		0.00
<b>3.07</b>	<b>Perindustrian</b>				
69	Pertumbuhan Industri	%	7.50		0.00
70	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	173.02		0.00
71	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	3.14		NA
<b>3.08</b>	<b>Transmigrasi</b>				
72	Cakupan Penempatan Transmigran	%	95		0.00
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>4.01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
73	Ranking Nasional LPPD	Ranking	5		NA
74	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas	%	100.00		0.00
75	Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	%	100.00		0.00
76	Persentase unit pelayan publik perangkat daerah yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	%	34.00		0.00
77	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	3		0.00
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>5.01</b>	<b>Perencanaan</b>				
78	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100.00		100
<b>5.02</b>	<b>Kuangan</b>				
79	Opini BPK	Status	WTP		0.00
80	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Point	0.52		0.00
81	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	36.97		0.00
<b>5.03</b>	<b>Kepegawaian</b>				
82	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.70		0.00
<b>5.04</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>				
83	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Point	0.27		0.00
<b>5.05</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>				
84	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	27.00		0.00
<b>5.06</b>	<b>Penghubung</b>				
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>6.01</b>	<b>Pengawasan</b>				
86	Nilai SAKIP	Kategori	BB (76,01 - 80,00)		0.00
<b>7</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>				
<b>7.01</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>				
87	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	4.67		0.00
88	Partisipasi Politik Masyarakat	%	84.57		0.00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
89	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%	40.00		0.00
90	Persentase penurunan konflik sosial	%	20.00		0.00
91	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.90		0.00

Sumber: BPS Provinsi NTB, OPD Penanggungjawab Indikator, 2022

Ket. NA= Not Available

Dari 91 indikator untuk mengukur aspek pelayanan umum, terdapat 3 indikator yang sudah dapat dihitung sedangkan 88 indikator lainnya belum dapat dihitung atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Ketiga indikator yang sudah dapat dihitung tersebut yaitu Nilai Realisasi Investasi, Rata-rata Lama Menginap, dan Nilai Tukar Petani.

Nilai Realisasi Investasi di Provinsi NTB Tahun 2022 merupakan realisasi antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Rincian untuk nilai Realisasi investasi tersebut tersebar pada 10 Kabupaten / Kota se- Provinsi NTB dengan perincian yaitu sebesar Rp. Rp196,529,844,973,- pada Kota Mataram, Rp240,984,490,865,- untuk Kabupaten Lombok Barat, Rp656,075,429,791 untuk Kabupaten Lombok Tengah, Rp69,392,315,495 untuk Kabupaten Lombok Timur, Rp320,541,788,106 untuk Kabupaten Lombok Utara, Rp2,286,373,983,878 untuk Kabupaten Sumbawa Barat, Rp70,131,533,847 untuk Kabupaten Sumbawa, Rp303,187,032,167 untuk Kabupaten Dompu, Rp30,425,974,240 untuk Kabupaten Bima, Rp11,936,571,402 untuk Kota Bima.

Selain Nilai Realisasi Investasi, indikator lainnya yang sudah dapat diukur yaitu Rata-rata lama menginap (RLM). Berdasarkan hasil rilis BPS, diketahui bahwa tamu di Hotel Bintang pada Bulan Maret 2022 sebesar 2,11 hari dan mengalami kenaikan sebesar 0,03 hari dibandingkan RLM Bulan Februari 2022 yang sebesar 2,08 hari.

Sedangkan untuk indikator kinerja Nilai Tukar Petani, Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada 8 kabupaten di Provinsi NTB pada bulan Maret 2022, NTP Provinsi NTB turun 0,92 persen dibandingkan NTP Bulan Februari 2022, yaitu dari 107,21 menjadi 106,22. Penurunan NTP pada Maret 2022 disebabkan oleh tingginya kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,51 persen sedangkan indeks harga yang diterima petani mengalami penurunan sebesar 0,42 persen.

Penurunan NTP bulan Maret 2022 dipengaruhi oleh turunnya NTP di empat subsektor pertanian, yaitu Subsektor Tanaman Pangan turun sebesar 2,39 persen; Subsektor Perikanan sebesar 0,50 persen; Subsektor Peternakan sebesar 0,38 persen; Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,22 persen. Sementara itu, NTP pada Subsektor Holtikultura mengalami kenaikan sebesar 6,18 persen.

Pada bulan Maret 2022, kemampuan daya beli petani di Provinsi NTB pada 4 subsektor berada di atas 100 (cukup baik) yang terdiri dari Subsektor Holtikultura yaitu sebesar 115,37; Subsektor Perikanan yaitu sebesar 113,72; Subsektor Peternakan yaitu sebesar 107,23; dan Subsektor Tanaman Pangan yaitu sebesar 105,35. Sedangkan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat memiliki kemampuan daya beli yang rendah atau NTP di bawah 100 yaitu sebesar 93,16.

## BAB V : PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam RKPD Tahun 2022 telah ditetapkan Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Program Unggulan tetapi belum dijabarkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan unggulan. Disamping itu juga tidak tersedia target yang akan dicapai pada setiap prioritas daerah serta program prioritas dan program unggulan;
2. Tidak tersedia pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan program perangkat daerah sehingga kesulitan untuk mengetahui pelaksanaan program prioritas dan program unggulan;
3. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2022, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah Rp. 5.968.740.209.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 472.179.773.960,00 atau 7,91 persen.
4. Hasil capaian kinerja dan anggaran sampai Triwulan I tahun 2022 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah tersebut, rata-rata capaian kinerja sebesar 2,81 persen dengan capaian keuangan sebesar 4,65 persen. Rendahnya capaian kinerja disebabkan karena pekerjaan pada Triwulan I masih terfokus pada program kegiatan yang bersifat administratif. Selain itu, rendahnya realisasi fisik dan serapan anggaran pada triwulan I ini, disebabkan karena sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan II – IV tahun anggaran 2022.
5. Terdapat 37 indikator kinerja pada tahun 2022, diketahui bahwa terdapat 3 indikator yang sudah dapat dihitung tingkat capaiannya dan 34 indikator yang lain masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Diantara 3 indikator yang telah dapat dihitung tingkat capaiannya pada Triwulan I 2021 tersebut adalah Nilai Realisasi Investasi, Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Meskipun belum ada indikator yang memenuhi target, namun capaian indikator dari sasaran pembangunan NTB tersebut on the track.
6. Capaian terhadap 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi NTB tahun 2022 secara keseluruhan terdapat 2 indikator atau 1,94 persen tercapai sesuai target bahkan melampaui, 4 indikator belum memenuhi target atau 3,88% dan masih terdapat 97 indikator belum tersedia (*Not Available/NA*) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

## 5.2 Rekomendasi

Rekomendasi umum yang diberikan terhadap hasil evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Perlu dijabarkan program Prioritas dan Program Unggulan kedalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan unggulan serta menetapkan besaran target yang akan dicapai pada setiap prioritas daerah serta program prioritas dan program unggulan. Penjabaran ini perlu dilakukan pada saat dilakukan perubahan RKPD Tahun 2022;
2. Perlu dilakukan pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan program perangkat daerah untuk memudahkan dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program prioritas dan program unggulan, karena program prioritas dan program unggulan secara nomenklatur berbeda dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
3. Perlu dilakukan penyesuaian indikator dan target baik indikator dan target di Program maupun indikator kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
4. Perlu peningkatan Konsolidasi internal dan koordinasi antar stakeholders agar capaian kinerja dapat terus ditingkatkan, karena beberapa indikator tidak hanya dapat dicapai dengan dukungan APBD Provinsi;
5. Terhadap target-target yang belum tercapai agar dilakukan pengawalan dan memfokuskan penganggaran sehingga pencapaian target kinerja di tahun depan dapat diakselerasi;
6. Secara umum, rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran pada triwulan I ini, disebabkan karena sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan II – IV tahun anggaran 2022.
7. Perlu mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan secara lebih intensif dan berkala sehingga dapat mengefektifkan pencapaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan.
8. Pada awal tahun 2022 telah dilakukan 2 kali perubahan Peraturan Gubernur terkait penjabaran APBD Tahun 2022 sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja. Perubahan pertama terkait pembentukan BRIDA yang mengakibatkan adanya pengalihan anggaran dari beberapa Perangkat Daerah untuk dialihkan ke BRIDA. Perubahan kedua yaitu adanya refocusing anggaran untuk menutup defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2021 pada seluruh Perangkat Daerah.